

**ANALISIS SEKTOR PRIORITAS  
SEBAGAI PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI  
WILAYAH DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember



Oleh :



*Ita Setyowati*

NIM. 980810101278

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2002**

Acad	Hadiah	Klas
Terima Kembali	04 NOV 2002	330.9
No induk :		SET
		1

idaw 2.1

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PENETAPAN SEKTOR PRIORITAS  
SEBAGAI PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**Yang dipersiapkan dan disusun oleh :**

**N a m a** : ITA SETYOWATI

**N. I. M.** : 980810101278

**J u r u s a n** : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

**Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :**  
**5 Oktober 2002**

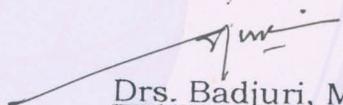
**dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai  
kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu  
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.**

**Susunan Panitia Penguji**

**Ketua,**

  
**Dr. H. Sarwedi, MM**  
NIP. 131 276 658

**Sekretaris,**

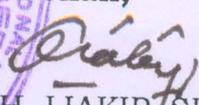
  
**Drs. Badjuri, ME**  
NIP. 131 386 652

**Anggota,**

  
**Drs. Zainuri, MSi**  
NIP. 131 832 336



**Mengetahui/Menyetujui**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Ekonomi**  
**Dekan,**

  
**Drs. H. LIAKIP/SU**  
NIP. 130 531 976



**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Sektor Prioritas Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

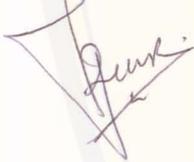
Nama Mahasiswa : Ita Setyowati

NIM : 980810101278

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

Pembimbing I



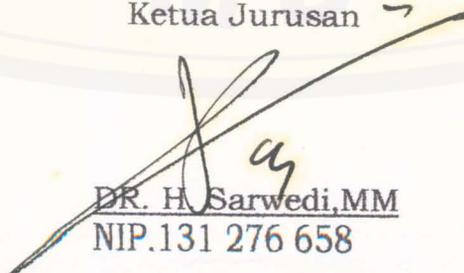
Drs. Zainuri, MSi  
NIP. 131 832 336

Pembimbing II



Teguh Hadi P. SE, MSi  
NIP. 132 092 300

Ketua Jurusan



DR. H. Sarwedi, MM  
NIP.131 276 658

Tanggal Persetujuan : September 2002

**MOTTO**

☞ *Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*

*(Q.S. Muhammad : 7)*

☞ *Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, sebagai tanda kerelaan akan usahanya itu.*

*(Ibnu Hibban)*

☞ *Iman itu tidak berpakaian, pakaiannya ialah taqwa, malu sebagai perhiasannya dan buahnya adalah ilmu.*

*(Al-Hakim)*

☞ *Kejar duniamu untuk akheratmu, biarkan mengalir apa adanya bagaikan air mengalir menuju keabadian-Nya, terpenting tawwakal-ikhtiar-dan tawwakal.*

*(Ita)*

☞ *Tak akan pernah ada kesulitan di dunia, seiring dibalik satu kesulitan terdapat dua kemudahan.*

*(Ita)*

## PERSEMBAHAN

- \* *Karya yang kecil ini penulis persembahkan kepada Allah SWT, Sang Pelindungku Yang Maha Kasih dan Sayang*
- \* *Guru-guru besarku yang tak kenal pamrih membimbingku menyusuri aliran ilmu menuju samudra kalam yang maha luas*

\* *Ibunda, guru pertamaku*

*Ibunda, yang mengertikan-ku kesabaran hidup*

*Ibunda, yang membelaiiku dengan cinta kasihnya*

\* *Ayahanda terhormat kuatkan hidupku*

\* *Mba' Irawaty aku sayang kamu*

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, segala puji syukur senantiasa terpanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Penetapan Sektor Prioritas Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Banyuwangi” disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi – Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa menulis skripsi itu tidak mudah, menulis skripsi memerlukan kerja keras dan waktu yang cukup lama, tetapi juga memberikan suatu pengalaman spesifik. Meskipun pada akhirnya segala kendala tersebut dapat teratasi, semua itu tidak terlepas dari jasa banyak orang atas segala budi baik tersebut, merupakan keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih yang tak terhingga sudah sepatutnya saya sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Zainuri, Msi dan Bapak Teguh Hadi P. SE, MSi selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan segala kearifan, kebijaksanaan serta kesabarannya memberikan arahan dan wawasan kepada penulis.
2. Bapak Drs. Liakip selaku Dekan Ekonomi Universitas Jember, beserta seluruh staf, segenap dosen Ekonomi – UNEJ atas segala bentuk dorongan semangat untuk segera menyelesaikan tugas ini.
3. Bapak DR. H. Sarwedi, MM dan Bapak Drs. Badjuri, ME.
4. Kepala Badan Pusat Statistik beserta seluruh stafnya dan Kepala Dinas Tenaga Kerja beserta staf atas bantuan dan kerjasama yang sudah diberikan.

5. Ayahanda Sugiharto dan Ibunda Ida Sri, atas segala pengorbanan yang tiada terbatas, berkat restunya-lah penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara-saudaraku tersayang Mba'Irawaty, mas Yudi, Mba' Nana dan Mba' Intan serta adikku Winda, Aditya, Denata dan Irqy atas dorongan dan semangat yang tiada henti.
7. Sahabat-sahabatku Bety, Izze, Rohma, Dundhyta, Deasy dan teman-teman di "Pondok CIA Indah" ( Evi, Titin, Iin, Puji, Yuli, Fantri ) atas kehangatan dan kebahagiaan yang sudah tercipta selama ini dan tak akan pernah terlupakan.
8. Saudara-saudaraku Masjid Nurul Haq (Mba' Desy Mut dan Mba' Nasyihah) atas segala bimbingan dan ketulusannya (tetap semangat), saudara-saudaraku PRP "Salsabila" Rambigundam (semoga Allah selalu mencurahkan ridho dan hidayah-Nya) dan seluruh rekan-rekan IESP Genap Ganjil 1998 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan semangat serta dorongannya mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

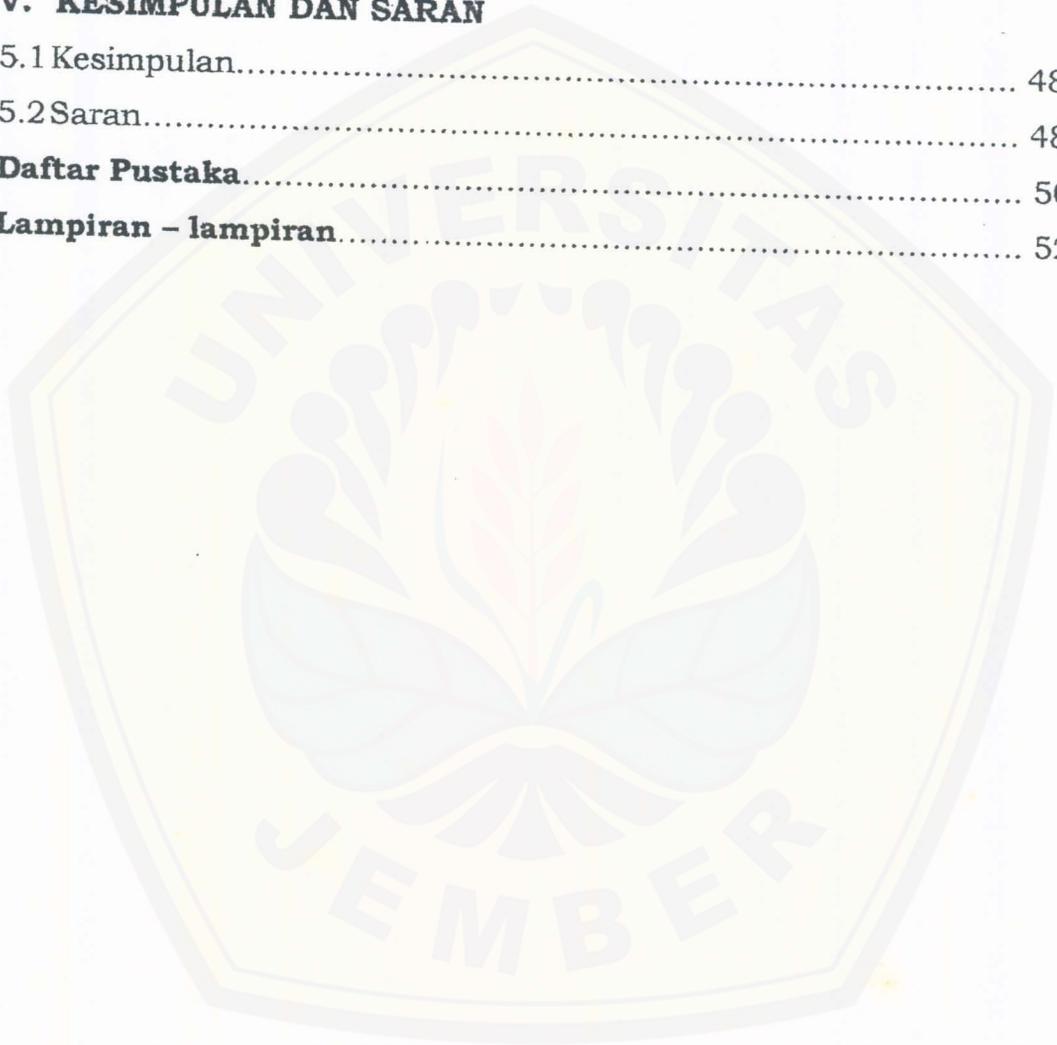
Jember, September 2002

Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman	
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Kata Pengantar.....	v
Halaman Daftar Isi.....	vii
Halaman Daftar Tabel .....	ix
Halaman Gambar.....	x
Halaman Daftar Lampiran.....	xi
Halaman Abstraksi.....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	6
2.2 Landasan Teori.....	8
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian.....	16
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.3 Metode Analisis Data.....	17
3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran.....	20

<b>IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum.....	21
4.2 Analisis dan Pembahasan.....	30
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	48
<b>Daftar Pustaka</b> .....	50
<b>Lampiran – lampiran</b> .....	52

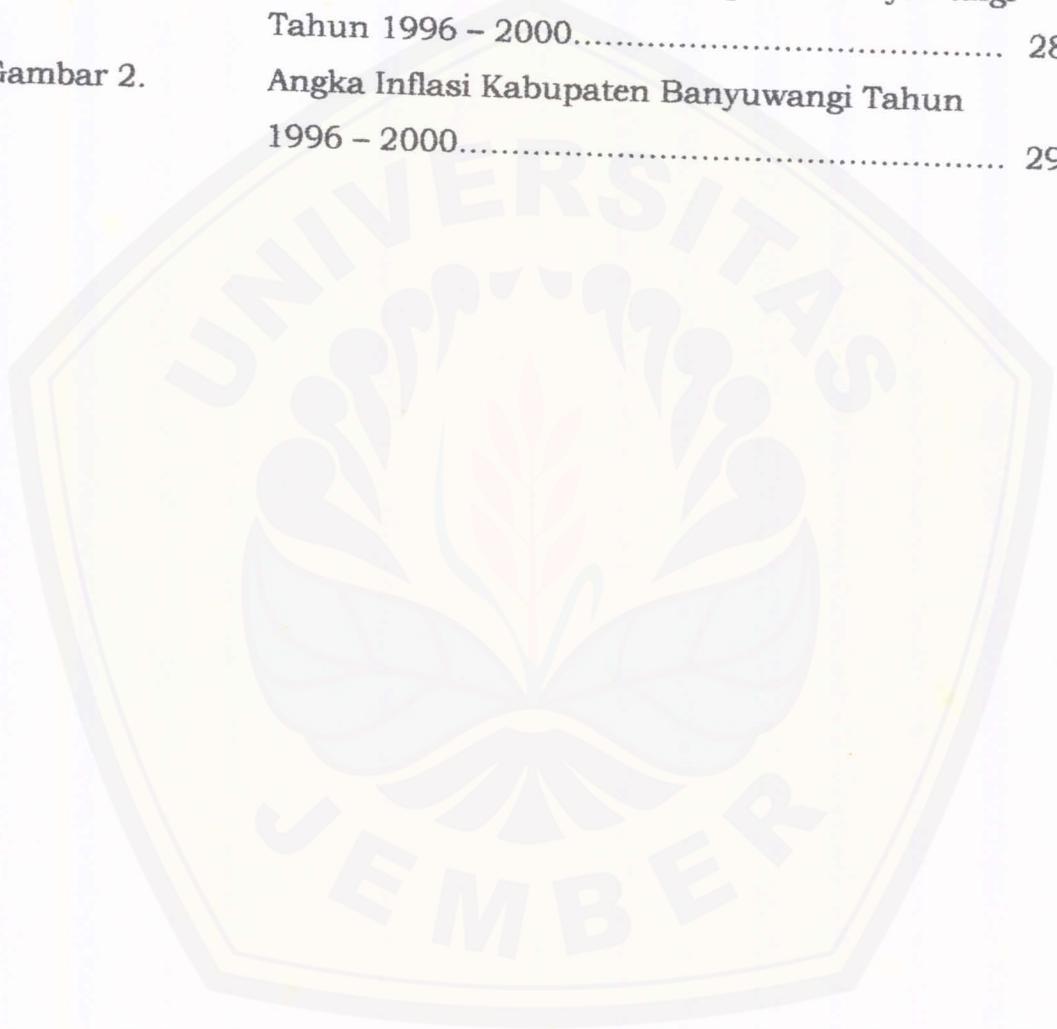


**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Struktur Perekonomian Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 -2000.....	25
Tabel 2.	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000 .....	26
Tabel 3.	Perkembangan Inflasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993 di Kabupaten Banyuwangi tahun 1996 – 2000.....	30
Tabel 4.	Nilai LQ Sektor Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	32
Tabel 5.	Nilai-DIQ Sektor Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996- 2000.....	35
Tabel 6.	Nilai Laju Pertumbuhan Sektor di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000 .....	37
Tabel 7.	Nilai Elastisitas Kesempatan Kerja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	39
Tabel 8.	Hasil Analisis Reskalling LQ, DLQ , Pertumbuhan dan Elastisitas Kesempatan Kerja .....	40

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000.....	28
Gambar 2.	Angka Inflasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000.....	29



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1996 – 2000 .....	52
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1996–2000 .... ..	53
Lampiran 3.	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banyuwangi .....	54
Lampiran 4.	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan.....	55
Lampiran 5.	Perhitungan Location Quotient Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	56
Lampiran 6.	Perhitungan Location Quotient Sub Sektor Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	58
Lampiran 7.	Perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) dan Analisis Slalling DLQ Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	60
Lampiran 8.	Perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) Sub Sektor Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	61
Lmpiran 9.	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Timur Tahun 1996 – 2000.....	62

Lampiran 10.	Analisis Skalling Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	63
Lampiran 11.	Analisis Skalling Pertumbuhan Sub Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	64
Lampiran 12.	Perhitungan Elastisitas Kesmpatan Kerja Sektor Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	65
Lampiran 13.	Analisis Sektor Prioritas Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	67
Lampiran 14.	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.....	68

## ABSTRAKSI

Penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Sektor Prioritas Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Banyuwangi” ini bertujuan untuk mengetahui sektor- sektor sub sektor yang dapat dijadikan prioritas sebagai pendorong pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Banyuwangi dengan pertimbangan daerah tersebut memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat prospektif bagi pembangunan perkonomian yang menjamin terhadap kelayakan penanaman investasi.

Wilayah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari kawasan yang dikategorikan sebagai dataran tinggi sekaligus memiliki kawasan yang tergolong kedalam dataran rendah, serta kawasan maritim yang mendukung aset produksi dan untuk menumbuhkan iklim investasi di dalam masyarakat, serta memberikan layanan informasi tentang sektor ekonomi yang dapat dijadikan prioritas program pengembangan perekonomian daerah, maka dilakukan penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut alat analisis yang digunakan menentukan sektor yang menjadi prioritas adalah *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), analisis pertumbuhan dan analisis penyerapan tenaga kerja. Dari empat indikator tersebut dilakukan analisis skalling untuk menentukan sektor prioritas.

Penelitian ini menghasilkan sektor pertanian sebagai sektor prioritas pertama di Kabupaten Banyuwangi dengan nilai skalling sebesar 100. Sektor yang menduduki prioritas kedua dan ketiga adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai skalling sebesar 90,690 dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai skalling sebesar 74,014.

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah bahwa sektor pertanian sebagai sektor prioritas pertama menerangkan bahwa sektor ini memenangkan persaingan, dimana dalam penelitian ini menggunakan *Location Quotient*.

## I. PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan Tap MPR No. X/ MPR/ 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan negara. Terutama pada Bab IV tentang tujuan pelaksanaan Reformasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang antara lain adalah untuk mengantisipasi krisis ekonomi sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalnya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar, maka salah satu agenda pembangunan ekonomi diusahakan dengan jalan penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkaitan serta perimbangan pusat dan daerah (Bappeda, 2000 : 6).

Sehubungan dengan itu, maka pemerintah Republik Indonesia pada bulan Mei 1999 mencanangkan 1 (satu) paket perundang-undangan, yaitu UU Nomor 22/ 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25/ 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua peraturan perundangan itu dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Implementasi penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab pada hakekatnya merupakan wujud kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah serta

antara provinsi dan kabupaten sebagai komponen pemerintahan daerah.

Berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan mewujudkan pengembangan potensi daerah, maka Kabupaten Banyuwangi dituntut dapat melaksanakan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya secara proporsional dan berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan azas-azas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Dalam konsepsi otonomi daerah sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah sedangkan dana perimbangan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Optimalisasi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah dihadapkan kepada konsekuensi terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi yang tentunya masih dicarikan usaha-usaha bagi peningkatan pendapatan asli daerah dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu usaha bagi peningkatan pendapatan asli daerah serta meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian adalah dengan menumbuhkan iklim investasi dikalangan masyarakat serta mengusahakan penanaman semangat investasi terhadap aneka bidang usaha, proyek investasi atau sektor unggulan, serta pendirian

industri yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, wahana pengembangan teknologi, wahana modernisasi nilai budaya daerah Kabupaten Banyuwangi pada masa-masa yang akan datang.

Kemudian dalam rangka pengidentifikasian sejumlah proyek investasi terhadap bidang usaha, sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, maka perlu adanya penentuan sektor basis dalam suatu daerah yang diharapkan akan dapat menjadi *leading sector*.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah juga perlu melakukan identifikasi bagi pengembangan potensi-potensi lokal. Kabupaten Banyuwangi yang sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari sektor pertanian serta perkembangan perekonomian yang cukup dinamis tercermin dari perkembangan PDRB setiap tahun mengalami kenaikan yang berarti. Perkembangan PDRB secara nominal menurut harga berlaku Kabupaten Banyuwangi tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 13,32 persen sampai tahun 2000. Peranan sektor primer, sekunder dan tersier atas dasar harga konstan dari tahun 2000 masing-masing sebesar 44,50 persen, 8,66 persen dan 46,84 persen. Memperhatikan angka tersebut sektor tersier mempunyai peranan yang dominan. Gambaran ini dapat menunjukkan rencana pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kabupaten Banyuwangi mulai mengarah ke sektor jasa (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2000 :19).

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari angka-angka tersebut dapat diketahui bahwa struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi mempunyai proporsi sektor primer dan tersier memiliki tingkat yang sama. Untuk mempertahankan kenaikan PDRB Kabupaten Banyuwangi, perlu suatu teknik dan perencanaan pembangunan daerah yang matang, mengingat dana yang terbatas untuk bergerak di semua sektor ekonomi. Keterbatasan dana dalam pengembangan semua sektor merupakan kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan di daerah. Pengembangan sektor tertentu yang mampu memacu sektor lainnya dan memberi dampak terhadap pengembangan lokal diharapkan akan dapat memecahkan permasalahan dalam pembangunan daerah. Kegiatan ekonomi yang diharapkan mampu berperan dalam pembangunan lokal adalah kegiatan ekonomi di sektor prioritas, walaupun sektor prioritas bukanlah satu-satunya yang berpengaruh dalam pengembangan lokal.

Semakin banyak sektor prioritas di suatu wilayah akan menambah arus pendapatan perkapita ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan produk atau output yang selanjutnya mendorong investasi lokal-regional-nasional atau yang dikenal dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dari latar belakang masalah maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang sektor-sektor apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendorong pengembangan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sektor-sektor prioritas yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendorong pengembangan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai :

1. bahan pertimbangan bagi perencana atau pelaksana pembangunan daerah, terutama dalam penentuan garis pertimbangan kebijakan yang ditempuh dan bahan pertimbangan bagi calon investor yang ingin menanamkan modalnya bagi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. bahan informasi atau bahan masukan bagi peneliti lain.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Disahkannya UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, diimplementasikan oleh pemerintah daerah dengan penentuan sektor yang dapat menjadi unggulan. Keunggulan yang dimiliki suatu daerah dapat diketahui dengan menentukan sektor yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan daerah yang lain.

Beberapa studi tentang penentuan sektor unggulan telah banyak dilakukan. Diantaranya studi-studi tersebut ada yang mengkaji sektor unggulan pada suatu wilayah regional antara periode tertentu, ada pula yang melakukan penelitiannya pada sektor-sektor yang dapat dijadikan sektor unggulan untuk periode yang akan datang.

Penelitian Mukaromah (2000) yang berjudul Analisis Penetapan Prioritas Sektoral di Kabupaten Jember ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Jember dengan tujuan mengetahui sektor prioritas yang ada di Kabupaten Jember selama tahun 1994-1998 dan sektor prioritas di masa yang akan datang. Hasil penelitian yang menggunakan alat analisa *Location Quotient*, dan *Dynamic Location Quotient* ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Jember selama tahun 1994-1998. Nilai LQ sektor pertanian sebesar 5,7054; sektor jasa-jasa sebesar 2,9061; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,2121; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,1352. Sektor yang

diharapkan menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang adalah sektor pertambangan dengan nilai DLQ sebesar 1,0137; sektor jasa-jasa dengan nilai DLQ sebesar 1,0134; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai DLQ sebesar 1,0147.

Pranajaya dalam penelitiannya pada tahun 1999 tentang Pengaruh Nilai Tambah Sektor Basis terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Jember Dati II Tahun 1987-1996 menggunakan alat analisa *Location Quotient* dan uji t bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor yang termasuk sektor basis dan menguji nilai tambah di sektor basis terhadap investasi (PMDN). Dalam penelitiannya Pranajaya menyimpulkan bahwa terdapat 5 dari 9 sektor ekonomi di Jember yang memiliki nilai indeks LQ > 1 anatara lain : sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan-bangunan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Nilai tambah sektor basis mempunyai pengaruh positif terhadap PMDN di Jember selama kurun waktu 1987 -1 996 dengan antara investasi sebesar -11.840.870,5841 dan MPI sebesar 0,0283. Artinya dengan investasi sebesar Rp 0,- (nol rupiah) maka investor akan datang membawa investasi keluar Kabupaten Dati II Jember dengan nilai investasi sebesar Rp 11.840.870,5814. Tetapi jika nilai tambah sektor basis sebesar Rp 10.000.000.000,- dalam setahun, maka pertambahan nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Dati II Jember sebesar Rp 283.000.000,-. Hasil uji t pada level significane 5 % menunjukkan bahwa variabel sebesar (y) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel tidak bebas (I).

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan penelitian dan alat analisis yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya yaitu

menggunakan alat analisis *Location Quotient* dan *Dynamic Location Quotient* tetapi dalam penelitian ini terdapat penambahan dua indikator dalam penentuan sektor prioritas yaitu analisis pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja serta perbedaan pada lokasi penelitian dan tahun penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dengan periode penelitian tahun 1996-2000.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Ekonomi Basis**

Permasalahan pembangunan dan analisis regional pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa perkembangan daerah tidak terjadi bersama-sama dengan kemampuan yang sebanding, sebab kondisi daerah yang satu berbeda dengan kondisi daerah yang lain. Satu faktor dasar dalam perbedaan ini adalah struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan penggunaan metode-metode yang tepat untuk menganalisis perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan daerah yang kurang berkembang.

Menurut Glasson (1997 : 62) ada beberapa teori ekonomi regional yang berusaha menjelaskan perubahan-perubahan struktur perekonomian, salah satunya adalah teori basis ekonomi atau *economic base theory*. Selanjutnya Glasson membagi kegiatan perekonomian disuatu daerah atau region menjadi dua sektor, yaitu : (1) sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa baik didaerahnya sendiri maupun menyediakan barang-barang dan jasa-jasa keluar batas-batas perekonomian

masyarakat yang bersangkutan; (2) sektor non basis adalah kegiatan yang hanya menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal didalam suatu daerah perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Jadi ruang lingkup produksi dan daerah pemasarannya bersifat lokal.

Implisit di dalam pembagian kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi. Bertambahnya kegiatan basis didalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa didalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk kedalam daerah yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan basis. Sektor basis mempunyai peranan penggerak pertama dimana setiap perubahannya mempunyai efek *multiplier* terhadap perekonomian regional (Glasson, 1997 : 101).

### **2.2.2 Ekonomi Wilayah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Dalam kerangka ini, sebuah strategi pembangunan yang dikembangkan harus memiliki dasar pijak kewilayahan yang kuat. Strategi pembangunan wilayah yang digunakan harus mampu

meningkatkan kemampuan wilayah untuk berkembang secara mandiri dan otonom. Hal ini menghasilkan beberapa keuntungan. Pertama, terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan mempercepat laju pertumbuhan secara nasional. Kedua, penguatan struktur perekonomian nasional karena memiliki persebaran pusat pertumbuhan yang akan mengurangi resiko yang disebabkan oleh sentralisme kekuatan ekonomi. Ketiga, memenuhi rasa keadilan dengan adanya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Keempat, peningkatan efektifitas kebijakan ekonomi dan pelayanan masyarakat di tingkat regional. Semua ini memerlukan adanya kebijakan pembangunan kewilayahan yang tepat.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1997 : 274).

### **2.2.3 Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan wilayah (*regional development planning*) merupakan ilmu yang relatif baru sehingga dalam perencanaan sektoral dirumuskan kebijaksanaan dari program pembangunan itu sendiri tanpa memperhatikan kegiatan pembangunan. Perencanaan regional dimaksudkan agar semua

daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Perencanaan regional mempunyai manfaat untuk pemerataan pembangunan atau perluasan dari pusat ke daerah (*spread effects*). Bila perencanaan regional dan pembangunan regional berkembang sendiri atas dasar kekuatan sendiri. Dengan demikian kenaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut tidak terlalu bergantung pada pusat, tetapi relatif cukup didorong dari daerah yang bersangkutan.

Perencanaan dalam pembangunan daerah harus menetapkan sasaran serta prioritas untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam rencana. Sasaran dan prioritas harus bersifat global dan sektoral. Adapun sasaran global dan sektoral satu dengan yang lain harus serasi dalam rangka mencapai laju pertumbuhan yang dibutuhkan bagi perekonomian. Hal ini membutuhkan penentuan prioritas atas dasar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perekonomian dengan memperhatikan sumber bahan baku, modal dan manusia yang tersedia (Sanusi, 2000 : 30).

Menurut Aziz (1994 : 9) kriteria utama keberhasilan pembangunan daerah adalah dalam bentuk PDRB secara sektoral maupun perkapita. PDRB secara agregat menunjukkan kemampuan daerah tersebut dalam menghasikan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah itu.

Pemilihan secara tepat terhadap sektor-sektor yang berperan penting dan mendapat prioritas untuk dikembangkan lebih dahulu disuatu daerah diperlukan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Prioritas tersebut dapat ditentukan dengan melihat

keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor yang lainnya serta melihat penghasil nilai ekspor yang besar. Hal ini disamping pengembangan sektor tersebut dapat mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang saling menunjang dan melengkapi sektor pemimpin maka pengembangan sektor tersebut juga dapat memberikan surplus neraca pembayaran sebesar-besarnya, sehingga dapat dipergunakan untuk akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi selanjutnya (Irawan dan Suparmoko, 1992 : 265).

Sektor prioritas menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah bersangkutan. Penjualan keluar daerah menghasilkan pendapatan bagi daerah. Arus pendapatan dari luar daerah menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tidak hanya meningkatkan permintaan sektor non prioritas. Permintaan yang naik akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan sehingga investasi modal sektor non prioritas merupakan investasi yang didorong (*induce*) oleh sektor prioritas (Arsyad, 1997 : 291).

#### 2.2.4 Analisis Location Quotient

Analisis *Location Quotient* merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan kapasitas ekspor dan derajat *self-sufficiency* suatu sektor yang menjadi sektor prioritas.

Analisis *Location Quotient* merupakan salah satu metode tidak langsung untuk mengukur konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu sektor ekonomi secara relatif berdasarkan Nilai Tambah Bruto atau Tenaga Kerja. *Location Quotient* merupakan indeks yang

membandingkan sumbangan dalam persen beberapa agregasi dasar (Aziz, 1994 : 154). Analisis LQ dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan sektor subsektor dalam kegiatan ekonomi di daerah.

Nilai LQ dimulai dari nol sampai satu. Nilai satu sebagai patokan karena menyatakan bahwa pangsa sektor di daerah himpunan. Jika LQ lebih kecil dari satu berarti sektor tersebut bukan sektor prioritas bagi daerah karena tidak mampu bersaing dengan sektor yang sama di daerah himpunan. Sebaliknya jika nilai LQ lebih besar dari satu menyatakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor prioritas bagi daerah dan mampu bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain dalam himpunan. Semakin besar LQ maka semakin besar pula daya saing sektor tersebut dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lain dalam himpunan (Yuwono, 1999 :47).

Teknik analisis LQ mempunyai kelemahan antara lain (Aziz, 1994 : 15) :

- 1) selera dan pola pengeluaran masyarakat adalah berlainan di setiap daerah;
- 2) tingkat konsumsi rata-rata masyarakat tidak sama di setiap daerah;
- 3) keperluan produksi dan produktivitas buruh berbeda di setiap daerah.

Asumsi yang digunakan dalam analisis LQ adalah (Aziz, 1994 : 15):

- 1) penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan daerah;
- 2) permintaan daerah akan suatu barang pertama-tama dipenuhi dari hasil daerah itu sendiri dan jika jumlah yang diminta

melebihi produksi daerah maka kekurangan dipenuhi dari luar daerah.

Analisis *Location Quotient* dapat dirumuskan sebagai berikut (Arsyad, 1997 : 292) :

$$LQ = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

dimana :

LQ = *Location Quotient* sektor i di daerah n

$v_i$  = *Value Added* sektor i daerah n

$v_t$  = PDRB daerah n

$V_i$  = *Value Added* sektor i daerah himpunan

$V_t$  = PDRB daerah himpunan

### 2.2.5 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisa DLQ diperlukan untuk mengetahui sektor unggulan di masa yang akan datang, mengingat sektor unggulan tahun sekarang belum tentu menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang.

Prinsip *Dynamic Location Quotient* sebenarnya sama dengan *Location Quotient*, hanya untuk mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t). Analisis DLQ dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuwono, 1999 : 50) :

$$DLQ = \left( \frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right)^t$$

dimana :

$g_{in}$  = rata-rata laju pertumbuhan sektor i di daerah bagian

$g_n$  = rata-rata laju pertumbuhan PDRB daerah bagian

$G_i$  = rata-rata laju pertumbuhan sektor  $i$  di daerah himpunan

$G$  = rata-rata laju pertumbuhan PDRB di daerah himpunan

### 2.2.6 Analisis Skalogram (Skalling)

Analisa Skalling digunakan untuk menentukan ranking suatu data yang dianalisa, cukup representatif dipakai bagi standarisasi data. Besarnya hasil skalling ini merupakan angka relatif antara 0 – 100. Skalling dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut (Budhiharsono, 1991 : 337) :

$$\text{Skalling} = \frac{N - N_{\min}}{N_{\max} - N_{\min}} \times 100$$

dimana :

$N$  = nilai variabel analisis

$N_{\min}$  = nilai minimum antara variabel analisis

$N_{\max}$  = nilai maksimum antara variabel analisis



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan atau fenomena yang sudah ada.

##### 3.1.2 Unit Analisis

Sebagian fokus penulisan yakni unit analisis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan sektor ekonomi, dalam hal ini difokuskan ke sektor prioritas (*leading sector*) yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

##### 3.1.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, secara teoritis dimulai sejak Kabupaten Banyuwangi berdiri hingga tahun 2002 saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil waktu tahun 1996-2000 dengan alasan bahwa periode tersebut merupakan periode pada dua kondisi yang krisis ekonomi dan normal.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat dari Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banyuwangi, Kantor DISNAKER Kabupaten Banyuwangi, Kantor BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi, data sekunder yang tersusun mulai tahun 1996 sampai tahun 2000, disamping itu juga melakukan studi pustaka.

### 3.3 Metode Analisis Data

#### 3.3.1 Analisis Sektor Prioritas

Untuk mengetahui sektor prioritas di Kabupaten Banyuwangi digunakan beberapa indikator yaitu analisis LQ, DLQ, kemampuan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan penyerapan tenaga kerja.

##### 1. Analisis Location Quotient

Metode analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor prioritas bagi pembangunan adalah *Location Quotient* (Arsyad, 1997 : 292) :

$$LQ = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

dimana :

- LQ = *Location Quotient* sektor i Kabupaten Banyuwangi
- $v_i$  = *Value Added* sektor i Kabupaten Banyuwangi (Rp/th)
- $v_t$  = PDRB Kabupaten Banyuwangi (Rp/th)
- $V_i$  = *Value Added* sektor i Propinsi Jawa Timur (Rp/th)
- $V_t$  = PDRB Propinsi Jawa Timur (Rp/th)

Kriteria yang dipakai :

- $LQ > 1$  maka sektor i merupakan sektor kuat, sehingga daerah yang bersangkutan secara potensial merupakan pengeksport produk sektor i ke daerah lain.
- $LQ = 1$  maka produk sektor i hanya dikonsumsi untuk daerah sendiri atau daerah tersebut tidak melakukan ekspor maupun impor.
- $LQ < 1$  maka sektor i merupakan sektor lemah sehingga daerah yang bersangkutan merupakan pengimpor sektor i.

## 2. Analisis Dynamic Location Quotient

Untuk mengetahui prospek sektor prioritas di masa mendatang terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi maka digunakan analisis *DLQ* (Yuwono, 1999 : 48) :

$$\overline{DLQ} = \left( \frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right)^L$$

dimana :

*DLQ* = sektor prioritas masa yang akan datang

*G<sub>in</sub>* = rata-rata laju pertumbuhan sektor *i* di Kabupaten Banyuwangi

*g<sub>n</sub>* = rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi

*G<sub>i</sub>* = rata-rata laju pertumbuhan sektor *i* di Propinsi Jawa Timur

*G* = rata-rata laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur

Kriteria *DLQ* adalah :

*DLQ* = 1, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor *i* terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor *i* terhadap laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur;

*DLQ* < 1, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor *i* terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi lebih lambat dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor *i* terhadap laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur;

*DLQ* > 1, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor *i* terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi lebih cepat dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor *i* terhadap laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur.

### 3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menghitung pertumbuhan sektor prioritas digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$g_i = \frac{NTBi - NTBi_{-1}}{NTBi_{-1}} \times 100 \%$$

dimana :

$g_i$  = laju pertumbuhan sektor prioritas tahun ke-i

$NTBi$  = nilai tambah bruto sektor prioritas tahun ke-i

$NTBi_{-1}$  = nilai tambah bruto sektor prioritas tahun ke-i - 1

### 4. Analisis Elastisitas Kesempatan Kerja

Untuk menghitung penyediaan lapangan kerja pada sektor prioritas digunakan perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja dengan rumus (Simanjuntak, 1985 : 83) :

$$E = \frac{L(\%)}{Q(\%)}$$

dimana :

$E$  = elastisitas kesempatan kerja sektor prioritas

$L$  = laju pertumbuhan tenaga kerja

$Q$  = laju pertumbuhan sektor prioritas

### 5. Analisis Skalogram

Untuk mengetahui ranking sektor prioritas yang harus dikembangkan lebih lanjut dari kelompok sektor prioritas yang ada di Kabupaten Banyuwangi digunakan analisis Skalling. Rumus skalling (Budhiharsono, 1991 : 337) :

$$\text{Skalling} = \frac{N - N_{\min}}{N_{\max} - N_{\min}} \times 100$$

dimana :

N = nilai variabel analisis

N min = nilai minimum antara variabel analisis

Nmax = nilai maksimum antara variabel analisis

### 3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Untuk menghindari kesalahpengertian pendefinisian variabel maka definisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto yaitu jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai lapangan usaha, yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah (region) tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas dasar faktor produksi. Metode pendekatan yang digunakan untuk menghitung PDRB adalah Pendekatan Produksi, dalam satuan Rp/th.
2. *Value Added* adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dikurangi biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap sektor, dalam satuan Rp/th.
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju peningkatan pendapatan yang ditunjukkan oleh angka-angka dalam PDRB dalam satuan persen.
4. Elastisitas kesempatan kerja merupakan laju peningkatan tenaga kerja setiap peningkatan laju pertumbuhan PDRB yang ditunjukkan dalam satuan persen.



#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Gambaran Umum

##### 4.1.1 Keadaan Geografis

Letak geografi Kabupaten Banyuwangi berada diujung Timur Pulau Jawa, terletak antara koordinat  $7^{\circ}43'$  -  $8^{\circ}46'$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ}53'$  -  $114^{\circ}38'$  Bujur Timur, dengan dibatasi oleh sebelah Utara Kabupaten Situbondo, sebelah Timur wilayah Laut Propinsi Jawa Timur di Selat Bali, sebelah Selatan wilayah Laut Propinsi Jawa Timur di Samudra Indonesia, sebelah Barat Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo.

Luas Kabupaten Banyuwangi meliputi wilayah darat seluas 578.250 ha dan wilayah laut seluas 175 km dari sepertiga wilayah laut Propinsi Jawa Timur yang pemanfaatannya antara lain digunakan sebagai pemukiman seluas 28.891 ha. Areal persawahan seluas 66.792,74 ha. Areal tegal seluas 16.133,47 ha. Areal perkebunan seluas 43.184,82 ha. Areal hutan lindung seluas 51.445,36 ha. Areal hutan produksi seluas 59.270,10 ha. Areal tanah tambak seluas 1.782 ha. Areal kebun Campur 2.163 ha. Areal tanah tandus seluas 388 ha. Areal yang diperuntukkan keperluan lain-lain 308.098,60 ha.

Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 21 kecamatan dan 211 desa/ kelurahan definitif serta 9 desa persiapan.

Dengan posisi geografis demikian, maka Kabupaten Banyuwangi terletak pada posisi strategis yang menjadi pintu gerbang dan lalu lintas perhubungan antara daerah-daerah lain di Pulau Jawa dan daerah-daerah lain yang berada di wilayah Indonesia

bagian Barat dengan Propinsi Bali dan daerah lain yang berada di wilayah Indonesia Bagian Timur.

#### 4.1.2 Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1998 oleh BPS sebanyak 1.451.787 jiwa terdiri dari 714.579 jiwa laki-laki dan 737.208 jiwa perempuan. Dengan kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> mencapai 251 jiwa dan pertumbuhan penduduk 0,03 persen. Sedangkan angka kelahiran di Kabupaten Banyuwangi adalah 2,3 jiwa per 1000 penduduk dan umur harapan hidup penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah 65 tahun.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar dilaksanakan di pedesaan dan mengembangkan sektor pertanian. Struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Banyuwangi berturut-turut meliputi berbagai sektor sebagai berikut : sektor pertanian 51,68 persen; industri 9,37 persen; perdagangan 15,50 persen; keuangan 0,58 persen; jasa 14,84 persen; pertambangan dan penggalian 0,47 persen listrik, gas dan air minum 0,23 persen; konstruksi 2,45 persen; angkutan dan komunikasi 4,52 persen serta lain-lain 0,36 persen.

#### 4.1.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Banyuwangi

Kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga sektor besar. Pertama, sektor primer (*agriculture*) adalah kegiatan ekonomi yang membudidayakan sumberdaya alam secara langsung tanpa adanya proses pengolahan. Sektor ini meliputi kegiatan pertanian dan pertambangan. Kedua, sektor sekunder (*manufacturing*) yaitu kegiatan

ekonomi yang mengolah sumber daya alam menjadi barang jadi atau setengah jadi. Termasuk dalam kategori ini adalah industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan dan konstruksi. Ketiga, sektor tersier (*service*) yaitu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang tetapi jasa. Kegiatan yang termasuk sektor ini adalah kegiatan yang meliputi perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lain.

Perubahan dan perkembangan struktur perekonomian wilayah dapat dilihat dari komposisi ketiga sektor dalam perekonomian wilayah. Dilihat dari prosentase sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi selama tahun 1996 – 2000 struktur perekonomian kabupaten Banyuwangi mempunyai proporsi yang hampir sama antara sektor primer dan sektor tersier. Pada tahun 1996 struktur perekonomian masih didominasi sektor primer sedangkan mulai tahun 1997 terjadi pergeseran struktur perekonomian, yakni dari sektor primer menjadi sektor tersier. Meskipun masih dalam selisih yang kecil sektor yang terdiri dari empat lapangan usaha ini mampu melebihi sumbangan sektor primer posisi ini terus bertahan sampai tahun 2000.

Struktur perekonomian tahun 1996 adalah sektor pertanian yang tersusun dari kegiatan pertanian, pertambangan dan penggalian ini mampu menyumbang 44,60 persen total PDRB. Kontribusi ini semakin menurun pada tahun berikutnya. Misalnya pada tahun 1997 menjadi 41,89 persen dan menurun menjadi 41,57 persen pada tahun 1998. Namun pada tahun 1999 terjadi peningkatan menjadi 45,24 persen, meskipun pada tahun berikutnya mengalami penurunan lagi menjadi 44,50 persen pada tahun 2000.

Pergeseran struktur perekonomian tahun 1997 dari sektor primer menempatkan sektor tersier pada posisi dominan. Pergeseran ini disebabkan kenaikan sumbangan pada tahun 1996 antara lain sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu dari 22,74 persen menjadi 24,21 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu dari 9,18 persen menjadi 9,45 persen; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa yaitu dari 5,49 persen menjadi 5,98 persen pada tahun 1997. Kontribusi yang diberikan pada PDRB dari sektor tersier sebesar 45,78 persen. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan sumbangannya pada tahun 1996. Peningkatan ini terus berlangsung sampai tahun 2000 kecuali pada tahun 1999 yang mengalami penurunan 0,52 persen dari tahun 1998.

Sektor ketiga dalam perekonomian Kabupaten Banyuwangi adalah sektor sekunder yang tersusun dari kegiatan industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; dan kegiatan bangunan dan konstruksi. Pendapatan yang disumbangkan PDRB oleh sektor sekunder cenderung menurun kontribusinya, kecuali pada tahun 1999 sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen dari tahun 1998. Sumbangan tiga sektor dalam struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi selama 1996 sampai tahun 2000 dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Struktur perekonomian wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000 (dalam persen)

No	Tahun	Sektor			Total
		Primer	Sekuder	Tersier	
1.	1996	44,60	11,62	43,78	100
2.	1997	41,89	12,33	45,78	100
3.	1998	41,57	11,51	46,92	100
4.	1999	45,24	8,36	46,40	100
5.	2000	44,50	8,66	46,84	100
Rata-rata		43,56	10,50	45,94	100

Sumber : PDRB, BPS Kabupaten Banyuwangi, 2002

#### 4.1.4 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Sektoral

Distribusi PDRB sektoral dapat digunakan untuk mengetahui peran masing-masing sektor sehingga dapat diketahui antara lain keberhasilan dan arah pembangunan daerah, pergeseran struktur ekonomi dan kegiatan pembangunan yang perlu diprioritaskan di Kabupaten Banyuwangi serta rencana pembangunan antar sektor pada waktu mendatang.

Untuk mengetahui distribusi PDRB menurut sektor digunakan perhitungan dengan pendekatan produksi. Pendekatan produksi membagi PDRB dalam sembilan sektor. Kesembilan sektor tersebut adalah sektor pertanian; sektor pertambangan, dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air minum; sektor bangunan dan kontruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.

Pada tahun 1996 produktivitas ekonomi Kabupaten Banyuwangi terukur pada besaran 1.637.930,72 juta rupiah. Setelah berjalan empat tahun terakhir, tepatnya tahun 2000 produktivitas ekonomi Kabupaten Banyuwangi meningkat sekitar 1,076 kali lipat.

Keberhasilan ini telah memberikan adanya indikasi tentang kemajuan pembangunan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. PDRB tahun 2000 terukur dengan angka nominal 1.762.160,88 juta rupiah, dibandingkan tahun 1999 yang sebesar 1.688.419,21 juta rupiah, diperoleh tingkat perkembangan sebesar 5,62 persen.

Tabel 2. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000 (%)

No.	Sektor Ekonomi	Tahun				
		1996	1997	1998	1999	2000
1.	Pertanian	43,94	41,17	40,98	44,49	43,72
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,66	0,72	0,59	0,75	0,78
3.	Industri Pengolahan	8,25	8,83	8,09	6,28	6,74
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,49	1,60	1,81	0,98	1,08
5.	Konstruksi	1,88	1,90	1,01	1,10	0,85
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	22,74	24,21	24,16	25,78	26,64
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	9,18	9,45	9,85	6,62	6,92
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,49	5,98	5,74	6,49	6,30
9.	Jasa-jasa	6,23	6,15	7,17	7,50	6,97
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB, BPS Kabupaten Banyuwangi, 2002

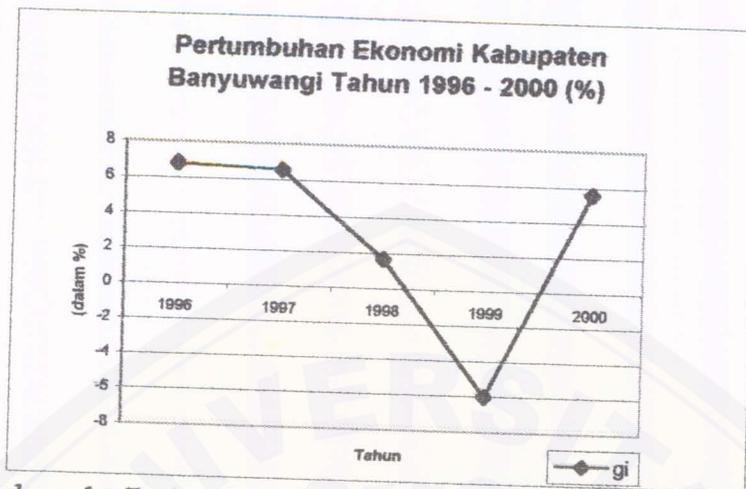
Perkembangan peranan sektoral tersebut berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah. Secara rinci peranan sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1996 – 2000 dapat dilihat pada tabel 2.

Pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan masih mendominasi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi. Terbukti sektor pertanian mampu memberikan sumbangan dengan rata-rata sebesar 42,86 persen dari tahun 1996 – 2000. Sedangkan serktor pertambangan dan penggalian hanya mampu memberikan kontribusinya dengan rata-rata terendah sebesar 0,70 persen.

#### **4.1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi**

Bagi para perencana dan pengambil keputusan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, angka pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai salah satu alat ukur dalam menentukan stabilitas ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1999 - 2000 lebih baik sebesar 5,62 persen sedangkan pada tahun 1998 - 1999 mencapai angka minus sebesar -6,00 persen.

Bila dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi itu selama lima tahun terakhir, dari sebelum sampai dengan terjadinya krisis ekonomi – tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 – yang melanda **perekonomian nasional**, pada tingkat regional krisis tersebut dampaknya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000.

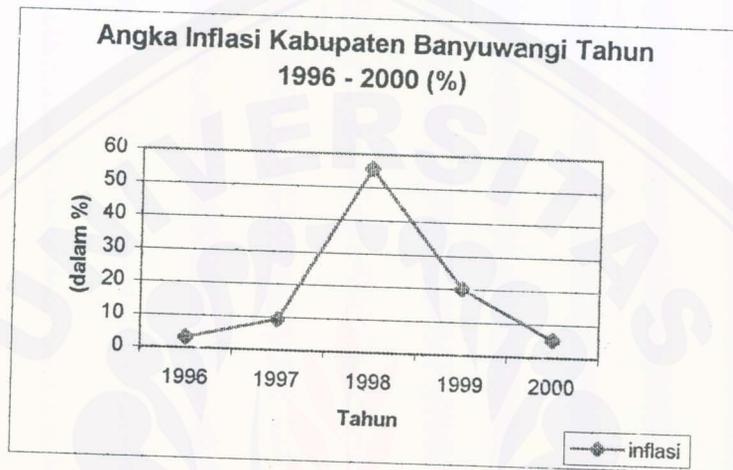
Kontraksi perekonomian nasional diduga mulai terjadi pada tahun 1997. Dampaknya pada tahun 1998 terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tercatat (-6,00 persen). Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 lalu, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi secara perlahan mulai membaik walaupun belum sebaik tahun 1996. Secara rinci pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 disajikan pada Gambar 1.

#### 4.1.6 Perkembangan Inflasi Sektor Ekonomi

Inflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga, fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan dengan pendapatan.

Angka inflasi PDRB Kabupaten Banyuwangi tahun 1996 - 2000 sangat berfluktuasi, yaitu antara 3,26 persen per tahun sampai 55,69 persen per tahun dengan nilai rata-rata laju inflasi sebesar 18,75

persen per tahun. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998. Hal ini disebabkan oleh situasi moneter yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada sektor riil. Tingkat perkembangan inflasi PDRB pada tahun 1996 – 2000 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Angka Inflasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000.

Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat inflasi PDRB Kabupaten Banyuwangi mulai mengalami peningkatan sejak tahun 1996 sampai puncaknya yang tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 55,69 persen. Hal ini disebabkan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan harga barang dan jasa juga meningkat.

Perkembangan inflasi PDRB sektoral dapat dilihat pada tabel 3, yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi setiap tahun mengalami fluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi tiap tahun. Pada tahun 2000 tingkat inflasi tertinggi dicapai oleh sektor jasa-jasa yaitu sebesar 40,17 persen. Hal ini berarti pada tahun 2000 barang produk sektor jasa-jasa mengalami kenaikan harga.

Tabel 3. Perkembangan Inflasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000 (%)

No.	Sektor Ekonomi	Tahun				
		1996	1997	1998	1999	2000
1.	Pertanian	2,04	15,42	88,88	29,03	3,36
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,02	4,44	35,54	21,23	3,66
3.	Industri Pengolahan	5,26	4,36	25,37	11,46	8,45
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,09	6,29	20,46	7,97	12,86
5.	Konstruksi	8,13	6,25	54,55	-17,08	-20,48
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,82	6,76	39,92	50,68	4,56
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1,29	0,32	10,32	-0,33	17,87
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,87	8,78	38,77	7,58	4,74
9.	Jasa-jasa	2,70	2,05	15,32	7,53	40,17
	PDRB	3,26	9,35	55,69	20,11	5,36

Sumber : PDRB, BPS Kabupaten Banyuwangi, 2002

## 4.2 Analisis dan Pembahasan

### 4.2.1 Analisis

Pengembangan ekonomi daerah yang antara lain telah mendorong daerah-daerah tingkat II mengembangkan produk unggulan daerah masing-masing. Produk unggulan tersebut baik berupa produk suatu industri hasil pertanian, pertambangan maupun produk olahan yang nilai tambahnya diharapkan dapat

meningkatkan laju pertumbuhan pemerintah harus menerapkan kebijakan yang tepat sesuai potensi pembangunan masing-masing wilayah. Produk unggulan ini harus berasal dari sektor yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan. Untuk menentukan sektor prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi tahun 1996 – 2000 digunakan beberapa alat analisis yaitu *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), Pertumbuhan ekonomi dan Elastisitas Kesempatan Kerja. Dari empat indikator tersebut kemudian dirangking melalui model Skallogram. Empat alat analisis tersebut adalah :

### **1. Analisis Location Quotient**

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu indikator menunjukkan besar atau kecilnya peranan suatu sektor dalam kegiatan ekonomi di daerah dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lain. Jika suatu sektor memiliki nilai LQ lebih besar dari satu, maka sektor tersebut merupakan sektor yang kuat sehingga potensial yang merupakan pengeksport produk ke daerah lain atau dengan kata lain dapat dijadikan sebagai *leading sector* karena sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya jika suatu sektor memiliki nilai LQ kurang dari satu, maka sektor tersebut lemah atau merupakan pengimpor produk dari daerah lain. Perhitungan LQ didasarkan pada nilai tambah bruto sektor tertentu terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi, dengan hasil perbandingan nilai tambah bruto yang sama terhadap PDRB Propinsi Jawa Timur. Pada tahun yang sama maka nilai LQ masing-masing sektor dapat diketahui. Hasil perhitungan LQ untuk sembilan sektor dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai LQ Sektor Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000

No.	Sektor Ekonomi	Tahun				Rata-rata	Reskalling	Ranking
		1996	1997	1998	1999			
1.	Pertanian	2,645	2,577	2,266	2,479	2,442	100	1
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,414	0,537	0,635	0,860	0,346	11,592	7
3.	Industri Pengolahan	0,288	0,295	0,313	0,232	0,247	1,990	8
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,809	0,906	0,836	0,410	0,407	19,770	5
5.	Konstruksi	0,274	0,282	0,189	0,229	0,183	0	9
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,080	1,135	1,156	1,225	1,278	42,432	2
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1,361	1,416	1,323	0,830	0,837	41,125	3
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	0,852	0,935	0,947	1,061	1,144	34,776	4
9.	Jasa-jasa	0,624	0,615	0,636	0,673	0,625	18,034	6

Sumber : lampiran 5

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 5 terdapat beberapa sektor yang mempunyai nilai rata-rata LQ lebih besar dari satu, yakni sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan enam sektor yang lain memiliki nilai LQ kurang dari satu selama lima tahun. Dari analisis LQ akan ditentukan sektor prioritas. Untuk mempermudah hasil analisis LQ masing-masing tahun dianalisa dengan teknik Skalling. Berdasarkan perhitungan analisis Skalling LQ pada lampiran 5 diperoleh hasil bahwa sektor pertanian merupakan sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi pada urutan kedua dan ketiga. Sedangkan sektor konstruksi mempunyai nilai rata-rata LQ terendah diantara sembilan sektor yang ada yaitu sebesar 0,231. Artinya sektor konstruksi merupakan sektor bukan basis yang cenderung mengimpor produk sektor-sektor tersebut dari daerah lain.

#### a. Sektor Pertanian

Sektor pertanian yang meliputi lima sub sektor yaitu tanaman bahan makanan; sub sektor tanaman perkebunan; sub sektor peternakan dan hasilnya; sub sektor kehutanan; dan sub sektor perikanan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor secara meyakinkan dominan atas sektor-sektor yang lain. Seperti ditunjukkan pula dari nilai LQ sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 2,035; tanaman perkebunan sebesar 1,607; peternakan dan hasilnya sebesar 4,189; kehutanan sebesar 2,642; dan perikanan sebesar 1,848 antara tahun 1996 – 2000 (lampiran 6).

b. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sub sektor yang mencakup sektor ini yaitu sub sektor perdagangan dan restoran merupakan sektor prioritas hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nilai LQ sebesar 1,210 dan 1,242, sedangkan sub sektor hotel hanya memiliki nilai rata-rata LQ sebesar 0.945 artinya sektor ini masih belum dapat dijadikan prioritas karena sub sektor ini belum mampu memberikan sumbangan pada PDRB.

c. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan yang meliputi sub sektor angkutan rel; angkutan jalan raya; angkutan laut; angkutan penyeberangan; dan jasa penunjang angkutan antara tahun 1996 – 2000 memiliki nilai rata-rata LQ sebesar 2,112 dimana nilai LQ terbesar diduduki oleh sektor angkutan penyeberangan yaitu sebesar 13,109. Sedangkan sub sektor komunikasi merupakan sektor yang bukan basis karena nilai rata-rata LQ kurang dari satu yaitu sebesar 0,205.

## **2. Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)**

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi kelemahan analisis LQ. Prinsip DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, hanya untuk mengintroduksi laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t). Analisis DLQ menunjukkan daya saing suatu sektor tertentu dengan sektor diluar daerah. Sektor yang mampu bersaing akan menjadi sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi. Kemampuan bersaing suatu sektor ditunjukkan dengan nilai DLQ. Jika nilai DLQ lebih besar dari satu maka sektor tersebut dikatakan

mempunyai kemampuan bersaing dan memiliki proporsi laju pertumbuhan yang lebih cepat dari daerah lain.

Untuk menentukan ranking, hasil perhitungan DLQ dianalisa menggunakan Skalling. Berdasarkan lampiran 7, nilai DLQ dapat dilihat pada Tabel 5. Dari nilai DLQ kemudian diskalling. Dalam tabel 5 dapat diketahui bahwa sektor prioritas menurut analisis Skalling DLQ adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa pada urutan kedua dan ketiga.

Tabel 5. Nilai DLQ Sektor Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000

No.	Sektor Ekonomi	DLQ	Skalling	Rangking
1.	Pertanian	0,990	47,736	4
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,922	14,193	7
3.	Industri Pengolahan	0,972	38,853	5
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,894	0	9
5.	Konstruksi	0,937	21,268	6
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,035	70,170	2
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,921	13,408	8
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,096	100	1
9.	Jasa-jasa	1,010	57,714	3

Sumber : Lampiran 7, diolah.

Nilai ini menunjukkan bahwa proporsi rata-rata laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di daerah bagian lebih cepat daripada daerah himpunan. Selama kurun waktu tahun 1996 - 2000 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Banyuwangi memiliki rata-rata laju pertumbuhan sebesar 8,8 persen pertahun, sedangkan di Jawa Timur sebesar - 3,3 persen pertahun. Hasil perhitungan DLQ

menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keunggulan bersaing dengan daerah lain.

Dari ketiga sektor yang memiliki nilai DLQ lebih dari satu tersebut dapat ditunjukkan bahwa pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa hampir semua sub sektor yang mendukungnya mempunyai nilai DLQ lebih dari satu, kecuali sub sektor jasa hiburan dan kebudayaan pada sektor jasa-jasa hanya sebesar 0.951 hal ini menunjukkan bahwa sub sektor jasa hiburan dan kebudayaan kurang dapat bersaing dengan daerah lain karena pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Banyuwangi hanya sebesar 1,5 persen sedangkan pertumbuhan di Jawa Timur sebesar 4 persen.

Sub sektor perdangan memberikan peranan yang besar pada sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Banyuwangi hal ini ditunjukkan oleh nilai DLQ sebesar 1.223 dengan laju pertumbuhan 6 persen antara tahun 1996 – 2000 sedangkan di Jawa Timur laju pertumbuhan –15 persen (lampiran 8).

### **3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektoral**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator perekonomian wilayah tertentu, dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/ GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak (Arsyad, 1997 : 11). Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB dan pertumbuhan sektor dapat diukur dengan membandingkan nilai tambah bruto dari tahun sebelumnya. Jika suatu sektor mempunyai

laju pertumbuhan yang lambat maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan begitu sebaliknya, jika pertumbuhannya cepat maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Nilai Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000 (%)

No	Sektor Ekonomi	Tahun					Reskalling	Rank
		1996	1997	1998	1999	2000		
1.	Pertanian	5,41	-017	1,24	3,35	2,49	32,300	8
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,02	17,14	-17,78	21,12	8,57	75,145	2
3.	Industri Pengolahan	5,81	14,09	0,05	-31,21	11,96	54,534	5
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	13,7 2	13,80	15,50	-48,47	14,58	73,484	3
5.	Konstruksi	6,18	7,60	-45,81	3,15	-19,66	0	9
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,98	13,46	1,47	1,53	7,84	71,458	4
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,56	9,65	6,09	-36,05	9,09	40,285	6
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	21,4 7	16,02	-2,44	7,66	1,30	100	1
9.	Jasa-jasa	4,64	2,81	18,66	-0,50	-2,98	38,917	7

Sumber : Lampiran 10, diolah.

Berdasarkan analisis Skalling pertumbuhan selama lima tahun pada lampiran 10 diperoleh urutan dari sektor yang memiliki nilai total skalling pertumbuhan dari yang tertinggi yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor listrik, gas dan air bersih pada urutan kedua

dan ketiga. Hasil perhitungan laju pertumbuhan pada lampiran 10 dapat dilihat pada tabel 6.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mempunyai rata-rata pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 1996 – 2000 didukung oleh adanya pertumbuhan dari sub sektornya antara lain pertumbuhan lembaga keuangan bukan bank dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,055 persen; sewa bangunan sebesar 8,612 persen; dan jasa perusahaan sebesar 31,262 persen namun pada sub sektor bank terjadi pertumbuhan yang negatif sebesar -14,619 persen sejak tahun 1998 sampai tahun 2000 meskipun terdapat perbaikan pada tahun 2000 sebesar 5,184 persen (lampiran 11).

#### **4. Elastisitas Kesempatan Kerja**

Metode analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya daya serap sektor ekonomi terhadap tenaga kerja atas kenaikan pendapatan daerah sebesar 1 (satu) persen atau dengan kata lain untuk mengetahui berapa kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing sektor bila terjadi kenaikan secara persentase pada pendapatan daerah di tiap-tiap sektor yang ada selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan analisis Skalling elastisitas kesempatan kerja selama lima tahun pada lampiran 12 diperoleh urutan dari sektor yang memiliki nilai total skalling elastisitas kesempatan kerja dari yang tertinggi yaitu sektor industri pengolahan; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor pertanian pada urutan kedua dan ketiga. Hasil perhitungan elastisitas kesempatan kerja pada lampiran 12 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Nilai Elastisitas Kesempatan Kerja Sektor Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 – 2000

No	Sektor Ekonomi	Tahun					Reskalling	Rank
		1996	1997	1998	1999	2000		
1.	Pertanian	0,076	-4,765	1,361	0,233	0,254	60,436	3
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,029	0,046	-0,095	0,032	0,089	59,587	4
3.	Industri Pengolahan	0,035	0,056	34,112	-0,021	0,065	100	1
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,034	0,056	0,109	-0,014	0,052	59,506	5
5.	Konstruksi	0,003	0,014	-0,037	0,206	-0,039	43,938	8
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,001	0,059	1,151	0,424	0,098	55,454	6
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,011	0,079	0,282	-0,018	0,084	48,898	7
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,006	0,052	-0,689	0,083	0,585	71,405	2
9.	Jasa-jasa	0,003	0,281	0,091	-1,277	-0,257	0	9

Sumber : Lampiran 12, diolah.

### 5. Sektor Prioritas di Kabupaten Banyuwangi

Analisis reskalling diperlukan untuk memudahkan dalam menentukan sektor prioritas, mengingat analisa skalling LQ, DLQ, laju pertumbuhan dan elastisitas kesempatan tenaga kerja memperoleh hasil yang berbeda-beda. Dengan analisis skalling penentuan sektor prioritas dapat dengan mudah ditetapkan. Langkah yang diambil dalam teknik analisis ini yaitu 1) total skalling LQ 2) total Skalling DLQ 3) total Skalling laju pertumbuhan 4) total Skalling elastisitas tenaga kerja 5) total no. 1, 2, 3, dan 4 diskalling kembali (reskalling).

Dari hasil analisis skalling LQ diperoleh sektor pertanian sebagai prioritas, analisis DLQ dan analisis pertumbuhan diperoleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebagai sektor prioritas, sedangkan analisis kesempatan tenaga kerja diperoleh sektor industri pengolahan sebagai sektor prioritas selama kurun waktu tahun 1996 – 2000. Untuk memperoleh sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi maka empat indikator tersebut di-skalling kembali (reskalling). Hasil reskalling dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Analisis Reskalling LQ, DLQ, Pertumbuhan dan Elastisitas Kesempatan Kerja

No	Sektor Ekonomi	LQ	DLQ	G	E	Total Skalling	Rank.
1.	Pertanian	500	47,73	217,14	255,39	1.020,28	1
2.	Pertambangan dan Penggalian	57,98	14,19	334,55	253,28	660,02	7
3.	Industri Pengolahan	9,98	38,85	278,07	353,66	680,57	6
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	98,87	0	330,01	253,08	681,96	5
5.	Konstruksi	0,03	21,26	128,63	214,42	364,35	9
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	212,180	70,17	324,46	243,02	849,82	3
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	205,647	13,40	239,03	226,74	684,82	4
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	173,903	100	402,67	282,64	959,21	2
9.	Jasa-jasa	90,20	57,71	235,28	105,28	488,48	8

Sumber : Lampiran 13, diolah.

Dalam tabel 8 diketahui bahwa sektor pertanian sektor tertinggi. Dari perhitungan tersebut dapat ditentukan bahwa sektor tersebut menjadi sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi di

Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan ranking yang diperoleh sektor kedua adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor industri pengolahan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor jasa-jasa dan terakhir sektor konstruksi.

#### 4.2.2 Pembahasan

Dengan prioritas pembangunan maka dapat dicapai pembangunan yang efisien dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terbatas, yang dimiliki oleh daerah tersebut. Identifikasi setiap sektor ekonomi daerah adalah salah satu kebijakan guna mengetahui keunggulan komparatif dan selanjutnya menentuksn keunggulan kompetitif yang dimiliki suatu sektor ekonomi di daerah tersebut. Kebijaksanaan ini juga diharapkan memberikan *spread effect* terhadap sektor-sektor lainnya.

Kebijaksanaan lainnya adalah kebijakan dana alokasi pembangunan. Perencanaan pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh dana yang memadai. Permasalahan alokasi ini merupakan masalah yang mendasar dalam pembangunan daerah. Prioritas pembangunan yang telah ditentukan oleh daerah dapat menentukan sektor-sektor yang memerlukan perhatian lebih.

Sektor yang unggul secara definitif adalah sektor yang memenangkan persaingan dengan sektor lain. Hal ini dapat dilihat dari pangsa atau sumbangan setiap sektor pada PDRB atas dasar harga konstan. Namun persoalannya bisa juga suatu sektor yang tidak unggul dalam suatu daerah merupakan suatu sektor yang

unggul dibandingkan daerah lain, sementara sektor unggulan dalam daerah justru kalah dengan sektor yang sama di daerah lain. Dalam konteks kekhasan daerah, maka yang lebih diutamakan adalah keunggulan suatu sektor pada suatu daerah dihadapan daerah lain.

Analisis dalam menentukan sektor unggulan dalam suatu daerah memerlukan suatu daerah sebagai pembanding. Masalahnya dimungkinkan misalnya sektor x pada daerah A kalah bersaing dengan daerah B, tetapi mungkin dapat menang dengan daerah C. Untuk mengatasi hal ini, maka digunakan daerah himpunan sebagai pembanding. Dalam penelitian ini Kabupaten Banyuwangi dibandingkan Propinsi Jawa Timur. Penggunaan daerah himpunan sebagai pembanding karena pangsa daerah himpunan menggambarkan kondisi rata-rata seluruh daerah bagian dari daerah himpunan tersebut. Jika pangsa suatu sektor di daerah lebih besar dari pangsa sektor itu di daerah himpunan, artinya pangsa sektor itu lebih besar dibandingkan rata-rata pangsa seluruh daerah himpunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor daerah itu unggul dibandingkan umumnya daerah bagian yang lain. Tetapi kalau pangasanya lebih rendah dibandingkan pangsa didaerah himpunan, artinya pangsa sektor tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata pangsa seluruh daerah bagian dari daerah himpunan, maka sektor itu kalah bersaing dibandingkan dengan umumnya daerah himpunan itu.

Analisis perbandingan antara pangsa suatu sektor pada suatu daerah dengan pangsa sektor tersebut dengan daerah daerah himpunan adalah dengan analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ merupakan indikator yang menunjukkan kekuatan atau besar kecil peranan sektor atau sub-sektor dalam suatu kegiatan ekonomi di

daerah. Nilai LQ dari 0 dengan nilai 1 sebagai patokan karena nilai 1 menyatakan bahwa pangsa sektor di daerah bagian sama dengan pangsa di daerah himpunan. Sektor atau sub sektor memiliki nilai LQ lebih dari satu maka sektor atau sub-sektor tersebut merupakan sektor atau sub sektor yang kuat, sehingga secara potensial merupakan pengekspor produk dari sektor atau sub sektor dari daerah tersebut ke daerah lain. Sektor atau sub sektor yang memiliki LQ kurang dari satu menunjukkan sektor atau sub sektor lemah dengan kata lain daerah tersebut menjadi pengimpor produk dari sektor atau sub sektor tersebut.

Hasil analisis data menunjukkan sektor-sektor yang menjadi sektor basis atau sektor prioritas di Kabupaten Banyuwangi antara lain sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pada sektor pertanian yang ditunjukkan oleh rata-rata nilai LQ setiap tahun lebih dari satu menggambarkan pada sektor ini Kabupaten Banyuwangi mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur, karena Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah agraris dimana hasil sektor ini selain dapat mencukupi kebutuhan daerah Kabupaten Banyuwangi juga dapat mencukupi kebutuhan daerah lain. Sub sektor peternakan dan hasilnya merupakan penyumbang terbesar pada sektor pertanian.

Kabupaten Banyuwangi sebagai penghubung antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia, juga memberikan dampak pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan adanya fasilitas penyeberangan yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi membuat perdagangan, hotel dan restoran meningkat. Meskipun pada sub sektor hotel yang ditunjukkan oleh rata-rata nilai LQ selama tahun

1996 – 1999 kurang dari satu, pada tahun 2000 sub sektor ini mampu meningkatkan nilai tambahnya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sektor pengangkutan dan komunikasi menduduki peringkat ketiga, hal ini disebabkan Kabupaten Banyuwangi selain merupakan daerah agraris juga merupakan daerah maritim. Kontribusi terbesar terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi adalah sub sektor angkutan penyeberangan, hal ini disebabkan letak geografis Kabupaten Banyuwangi yang berada di ujung timur pulau Jawa mengakibatkan daerah ini menjadi penghubung antara wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia.

Kelemahan LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Itu artinya bahwa sektor yang unggul pada tahun ini belum tentu unggul pada tahun yang akan datang. Sebaliknya sektor yang belum unggul pada saat ini akan unggul di masa mendatang. Reposisi demikian dapat terjadi tergantung laju pertumbuhan sektor itu di daerah himpunan. Sektor yang laju pertumbuhannya di daerah bagian lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor itu di daerah himpunan, sekalipun sektor ini unggul sekarang, namun jika keadaan tidak diubah suatu ketika akan kalah bersaing dengan daerah lain. Sebaliknya sektor di daerah bagian yang bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan laju sektor itu di daerah himpunan, maka sekalipun belum merupakan sektor unggulan sekarang kemudian hari dapat diharapkan unggul.

Nilai laju pertumbuhan dapat positif dan dapat pula negatif. Sejahter nilai pertumbuhan seluruh sektor positif baik di daerah bagian maupun di daerah himpunan, menggunakan analisis LQ

masih dapat diterima dengan pemahaman nilai 1 artinya laju pertumbuhan sektor tertentu pada daerah sama dengan laju pertumbuhan daerah-daerah lain di daerah himpunan. Persoalannya adalah bahwa laju pertumbuhan suatu sektor dapat bernilai positif pada daerah bagian akan menghasilkan LQ yang negatif jika laju pertumbuhan di daerah himpunan negatif. Akibatnya dapat ditafsirkan sama dengan jika laju pertumbuhan suatu sektor yang bernilai negatif di daerah bagian sementara di daerah himpunan bernilai positif yang juga menghasilkan LQ negatif. LQ negatif sebenarnya tidak dapat ditafsirkan, karena sebagaimana dijelaskan di muka batas minimum nilai LQ adalah nol. Inilah sebabnya LQ tidak dapat digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan.

Segabai alternatif dapat digunakan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Prinsip DLQ sebesarnya masih sama dengan LQ, hanya untuk mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t).

Hasil analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) menunjukkan bahwa sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan seluruh sub sektor yang mendukungnya memiliki nilai DLQ lebih besar dari satu. Hal ini berarti bahwa sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan beserta seluruh sub sektor pendukungnya mempunyai proporsi laju pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan propinsi Jawa Timur. Karena rata-rata laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 8,8 persen sedangkan di Jawa Timur rata-rata laju pertumbuhan pada sektor ini sebesar -3,3 persen.

Sektor kedua hasil sakalling DLQ adalah perdagangan, hotel dan restoran, dimana laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan di Jawa Timur adalah sub sektor perdagangan. Dengan rata-rata laju pertumbuhan di Banyuwangi sebesar 6 persen sedangkan di Jawa Timur -15 persen.

Laju pertumbuhan sektor jasa-jasa selama kurun waktu lima tahun di Kabupaten Banyuwangi sebesar 4,5 persen lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan sektor jasa-jasa di wilayah Jawa Timur yaitu sebesar 0,7 persen, dengan kontribusi terbesar sub sektor swasta.

Indikator ketiga dalam penetapan sektor prioritas dilihat dari laju pertumbuhan sektor ekonomi. Selama kurun waktu 1996 - 2000 di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kontribusi terbesar dihasilkan oleh sub sektor jasa perusahaan dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun sebesar 31,28 persen dimana sub sektor bank memiliki pertumbuhan negatif selama kurun waktu tersebut yaitu sebesar -14,61 persen, hal ini dikarenakan ada penurunan pertumbuhan pada tahun 1998 - 1999, meskipun pada tahun 2000 mengalami kenaikan. Penurunan tersebut merupakan imbas dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997.

Elastisitas kesempatan kerja sebagai indikator keempat dalam penetapan sektor prioritas menghasilkan sektor industri pengolahan sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar. Rata-rata elastisitas kesempatan kerja di sektor industri pengolahan sebesar 7,05 persen. Artinya bahwa apabila ada peningkatan di

sektor tersebut sebesar 1 persen maka sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja sebesar 7,05 persen.

Dari masing-masing keempat indikator tersebut ternyata menghasilkan sektor unggulan yang berbeda-beda, untuk mempermudah dalam menentukan sektor prioritas digunakan analisis reskalling. Langkah yang diambil dalam teknik analisis ini dengan cara menjumlahkan total dari masing-masing indikator, sehingga hasil dari masing-masing indikator yang mungkin saling bertentangan dapat dikonversikan. Hasil analisis reskalling menetapkan sektor pertanian sebagai sektor prioritas pertama dengan nilai reskalling sebesar 100, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebagai sektor prioritas kedua dengan nilai reskalling 90,690 , dan sektor ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai reskalling sebesar 74,014.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian tentang analisis penetapan sektor prioritas sebagai pendorong pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Banyuwangi dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan analisis skalling dari empat indikator yaitu LQ, DLQ, pertumbuhan dan elastisitas tenaga kerja diperoleh sektor yang memiliki nilai reskalling dari yang tertinggi berturut-turut sebagai sektor prioritas di Kabupaten Banyuwangi adalah pertama : sektor pertanian; kedua : sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; ketiga : sektor perdagangan, hotel dan restoran; keempat : sektor pengangkutan dan komunikasi; kelima : sektor listrik, gas dan air bersih; keenam : sektor industri pengolahan; ketujuh : sektor pertambangan dan penggalian; kedelapan : sektor jasa-jasa dan kesembilan : sektor konstruksi.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka yang perlu dicermati oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan pembangunan di wilayah ini adalah :

1. pembangunan di Kabupaten Banyuwangi hendaknya melihat potensi sektor yang dimiliki untuk mempercepat pembangunan.
2. perhatian terhadap sektor ekonomi harus seimbang artinya bahwa bukan berarti konsentrasi pengembangan hanya ditujukan pada sektor yang menjadi basis saja sebab sektor yang belum menjadi basis juga mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sektor basis di masa yang akan datang.

3. Kabupaten Banyuwangi dengan segala potensinya memberikan peluang investasi yang cukup banyak antara lain dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri manufaktur dan pariwisata.
4. demi berlangsungnya pembangunan perlu dilakukan pengembangan misalnya pada sektor pertanian dimana sebagai sektor prioritas misalnya dengan menggali lebih lanjut komoditi unggulan yang dapat dijadikan sebagai produk yang mempunyai nilai tambah di sektor pertanian, contoh : intensifikasi sapi potong, budidaya Jati Emas dan Nilam pada perkebunan rakyat, atau budidaya ikan kerapu dengan sistem keramba.
5. Bidang pertanian memberikan kemungkinan pengembangan komoditi budi daya dan penyulingan minyak wijen, bidang perikanan menyajikan pengembangan investasi dalam pengangkapan dan budi daya ikan lepas pantai serta pembangunan hotel dan restoran seafood yang dilengkapi tempat pemancingan ikan lepas pantai, bidang peternakan memungkinkan pengembangan industri pengolahan kulit dan industri susu berbasis peternakan sapi perah. Sedangkan industri pariwisata memungkinkan dalam hal penataan tata ruang dan pemanfaatan kawasan pariwisata alam Kabupaten Banyuwangi dalam konsepsi Ecotourism.
6. perlu adanya jalinan kerjasama secara terpadu diantara jajaran instansi kedinasan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk merangsang investasi Kabupaten Banyuwangi sesuai sektor pembangunan pada jajarannya dalam rangka memberikan informasi terhadap investor.

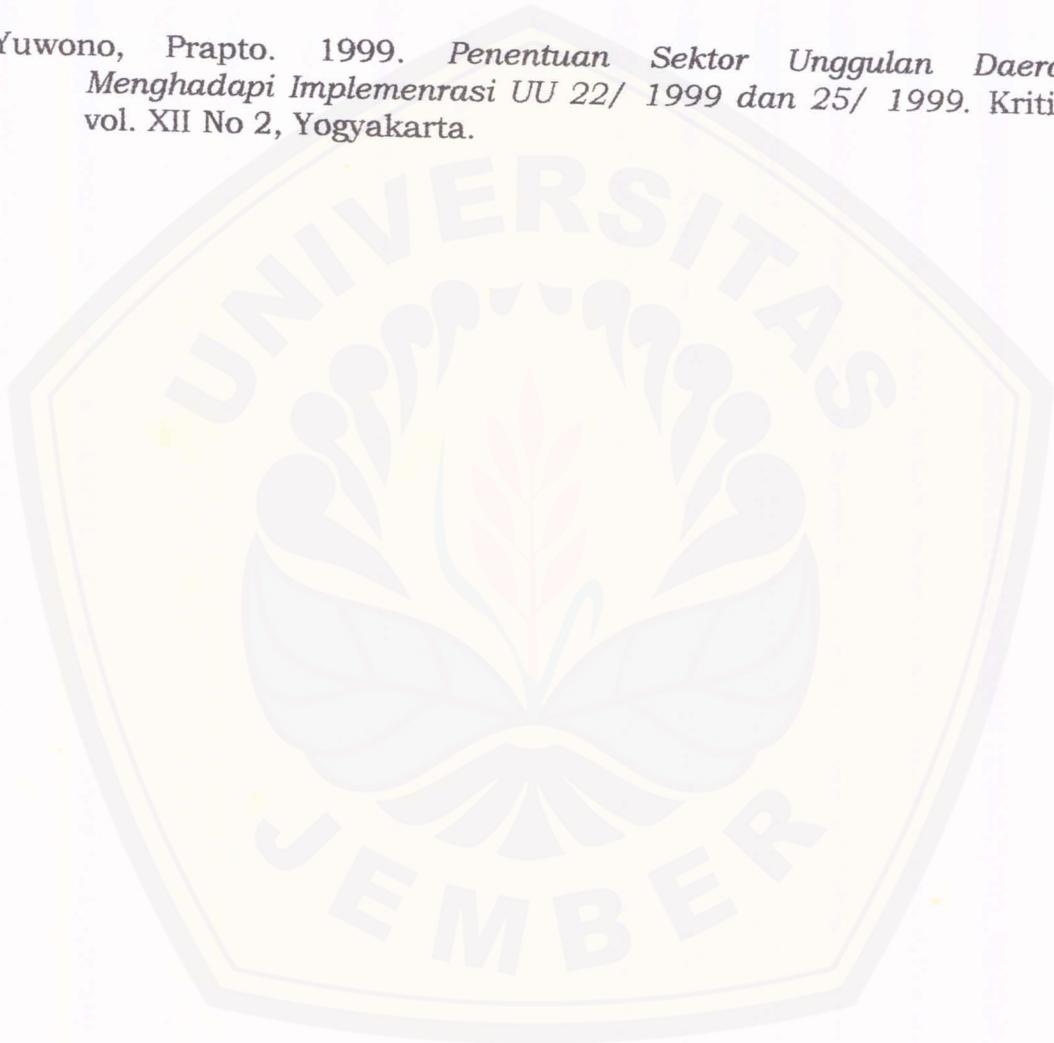
**DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Aziz, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : LPFE-UI.
- Budiharsono. 1991. *Perencanaan Pembangunan Wilayah : Teori, Model Perencanaan dan Penerapannya*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- BPS Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. 1998. *Produk Domestik Regional Bruto Tahun 1993-1997*. Banyuwangi. BPS.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2000*. Banyuwangi. BPS.
- Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 2000. *Laporan akhir Penyusunan Provil Investasi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2000*. Banyuwangi : Bappeda.
- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi. 2001. *Banyuwangi dan Tenaga Kerja Tahun 1993-2000*. Banyuwangi : Disnaker.
- Glasson, J. 1997. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta : LPFE-UI.
- Irawan dan Suparmoko. 1992. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : BPFU-UGM.
- Mukaromah. 2000. *Analisis Pendapatan Prioritas Sektoral di Kabupaten Jember*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember : FE-UJ.
- Pranajaya, Hernowo Guntur. 1999. *Pengaruh Nilai Tambah Sektor Basis terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1987-1996*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember : FE-UJ.

Sanusi, Bachrawi. 2000. *Pengantar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI.

Simanjuntak, p 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : LPFE-UI

Yuwono, Prapto. 1999. *Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implemenrasi UU 22/ 1999 dan 25/ 1999*. Kritis, vol. XII No 2, Yogyakarta.



**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1996 - 2000 (Jutaan Rupiah)**

No.	Sektor Ekonomi	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-rata
1.	Pertanian	853.810,37	983.872,66	1.881.443,72	2.476.144,79	2.624.836,10	1.764.021,53
2.	Pertambangan dan Penggalian	13.249,23	16.208,88	13.064,47	26.524,70	29.852,37	19.779,93
3.	Industri Pengolahan	152.483,20	181.608,77	2.227.789,24	174.248,41	211.573,15	589.540,55
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	25.785,52	31.191,01	43.394,39	24.253,02	31.362,67	31.197,32
5.	Konstruksi	37.236,94	42.571,13	35.653,32	30.447,01	19.482,14	33.078,41
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	428.979,00	517.187,58	734.353,28	790.130,31	890.928,78	672.315,79
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	158.816,72	174.695,72	204.452,79	133.146,50	171.216,43	168.465,63
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	115.339,00	146.375,81	198.153,89	236.019,40	250.428,58	189.263,34
9.	Jasa-jasa	128.926,50	132.021,28	180.650,35	188.581,67	256.450,07	177.325,97
Produk Domestik Regional Bruto		1.910.182,67	2.225.732,82	3.523.955,43	4.079.545,81	4.486.130,29	3.245.109,40
Pertumbuhan PDRB (%)			15,23	91,23	31,61	6,00	36,02

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2002

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1996 - 2000 (Jutaan Rupiah)**

No.	Sektor Ekonomi	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-rata
1.	Pertanian	12.845.396,59	14.872.968,87	28.832.429,04	32.775.610,75	35.525.625,50	24.970.406,15
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.351.026,37	1.326.868,64	1.259.912,36	2.460.299,78	3.968.641,75	2.073.349,78
3.	Industri Pengolahan	22.097.863,30	26.343.658,39	38.257.841,93	41.158.117,33	45.400.373,50	34.651.570,89
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.337.127,99	1.696.647,34	2.141.754,39	2.828.359,77	3.906.942,93	2.394.166,48
5.	Konstruksi	5.198.020,54	5.920.107,33	7.266.955,79	7.355.906,13	7.906.860,23	6.729.170,00
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15.975.480,52	19.026.576,20	32.069.409,12	34.478.502,98	39.390.276,30	28.188.049,02
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4.977.378,09	5.403.416,24	8.277.816,52	9.071.944,31	10.608.840,61	7.667.879,15
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	4.991.241,08	5.451.218,69	5.743.605,88	6.064.712,81	6.664.393,26	5.783.034,34
9.	Jasa-jasa	7.735.022,19	8.730.920,99	11.903.471,86	14.362.742,25	16.451.880,46	11.836.807,55
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>76.566.556,68</b>	<b>88.772.382,68</b>	<b>135.753.197,90</b>	<b>150.555.746,12</b>	<b>169.823.642,63</b>	<b>124.294.345,20</b>
<b>Pertumbuhan PDRB (%)</b>		<b>15,94</b>	<b>52,92</b>	<b>10,90</b>	<b>12,80</b>	<b>23,14</b>	

Sumber data : Kantor Statistik Jawa Timur, 2002

**Lampiran 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1996 - 2000 (Jutaan Rupiah)**

No.	Sektor Ekonomi	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-rata
1.	Pertanian	719.677,05	718.484,40	727.415,85	751.746,37	770.464,75	737.557,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	10.793,67	12.643,50	10.395,82	12.591,12	13.670,43	12.018,91
3.	Industri Pengolahan	135.081,23	154.120,23	154.196,71	106.080,17	118.772,01	133.650,07
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	24.479,53	27.858,28	32.174,81	16.580,69	18.997,84	24.018,23
5.	Konstruksi	30.822,73	33.165,26	17.972,10	18.538,90	14.893,72	23.078,54
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	372.403,66	422.536,95	428.744,99	435.290,97	469.418,34	425.678,98
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	150.354,30	164.855,83	174.891,76	111.842,90	122.013,95	144.791,75
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	89.958,18	104.367,24	101.816,17	109.613,27	111.037,59	103.358,49
9.	Jasa-jasa	104.360,37	107.296,29	127.313,47	126.668,07	122.892,25	117.706,09
Produk Domestik Regional Bruto		1.637.930,72	1.745.328,98	1.774.951,82	1.668.419,21	1.762.160,88	1.717.758,32
Pertumbuhan PDRB (%)		6,80	6,56	1,70	-6,00	5,62	2,93

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2002

**Lampiran 4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1996 - 2000 (Jutaan Rupiah)**

No.	Sektor	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-rata
1.	Pertanian	10.253.902,38	10.360.819,63	9.840.471,06	10.056.430,48	10.126.777,37	9.773.146,00
2.	Pertambangan dan Penggalan	982.419,95	875.522,36	501.798,67	820.481,97	1.269.837,03	981.455,34
3.	Industri Pengolahan	17.698.376,00	19.409.565,66	15.104.078,20	15.096.119,16	15.426.479,38	15.820.501,26
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.139.846,68	1.143.104,30	1.179.194,65	1.332.448,18	1.497.408,46	905.907,71
5.	Konstruksi	4.239.635,33	4.370.532,83	2.918.521,24	2.629.204,56	2.619.755,45	3.864.810,05
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12.993.706,42	13.828.696,97	11.369.207,36	11.403.499,39	11.798.137,01	12.011.970,83
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4.162.807,67	4.326.276,08	4.051.086,25	4.441.895,08	4.680.459,53	3.816.660,84
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.979.808,69	4.145.932,45	3.296.433,66	3.087.742,86	3.117.254,48	3.783.423,46
9.	Jasa-jasa	6.302.065,91	6.483.125,59	6.138.105,66	6.191.148,76	6.314.134,56	6.099.837,32
Produk Domestik Regional Bruto		61.732.469,03	64.853.575,86	54.398.896,74	55.058.970,46	56.850.243,28	57.047.812,90
Pertumbuhan PDRB (%)		8,212	5,056	-15,120	1,213	2,763	0,225

Sumber data : Kantor Statistik Jawa Timur, 2002

Lampiran 5. Perhitungan Nilai Locatient Quotient (LQ) dan Analisis Skalling  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000

No.	Sektor	1996				1997			
		vi/vt (1)	Vi/Vt (2)	LQ (1 / 2)	Skalling vi/vt (3)	Vi/Vt (4)	LQ (3 / 4)	Skalling	
1.	Pertanian	0,43938	0,16610	2,64525	100,000	0,41166	0,15976	2,57679	100,000
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00659	0,01591	0,41409	5,907	0,00724	0,01350	0,53661	11,096
3.	Industri Pengolahan	0,08247	0,28669	0,28766	0,576	0,08830	0,29928	0,29505	0,570
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,01495	0,01846	0,80942	22,580	0,01596	0,01763	0,90558	27,174
5.	Konstruksi	0,01882	0,06868	0,27401	0,000	0,01900	0,06739	0,28197	0,000
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,22736	0,21048	1,08019	33,998	0,24210	0,21323	1,13538	37,188
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,09180	0,06743	1,36128	45,852	0,09446	0,06671	1,41595	49,414
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	0,05492	0,06447	0,85192	24,372	0,05980	0,06393	0,93540	28,474
9.	Jasa-jasa	0,06371	0,10210	0,62407	14,763	0,06148	0,09997	0,61497	14,511

(Lanjutan Lampiran 5)

vi/vt (5)	1998				1999				2000				
	Vi/Vt (6)	LQ (5/6)	Skalling	vi/vt (7)	Vi/Vt (8)	LQ (7/8)	Skalling	vi/vt (9)	Vi/Vt (10)	LQ (9/10)	Skalling	Total Skalling	Reskalling
0,40982	0,18089	2,26553	100,000	0,45057	0,18265	2,47886	100,000	0,43723	0,17898	2,44287	100,000	500,000	100,000
0,00586	0,00922	0,63494	21,485	0,00755	0,01490	0,85969	12,283	0,00776	0,02244	0,34566	7,217	57,989	11,592
0,08687	0,27765	0,31288	5,978	0,06358	0,27418	0,23230	0	0,06740	0,27265	0,24721	2,861	9,985	1,990
0,01813	0,02168	0,83625	31,179	0,00994	0,02420	0,41050	7,99812	0,01078	0,02647	0,40736	9,946	98,877	19,770
0,01013	0,05365	0,18873	0,000	0,01111	0,04775	0,22923	0,03568	0,00845	0,04630	0,18254	0,000	0,036	0,000
0,24155	0,20900	1,15577	46,564	0,26090	0,20711	1,22492	45,9865	0,26639	0,20852	1,27751	48,443	212,180	42,432
0,09853	0,07447	1,32313	54,622	0,06704	0,08068	0,83040	26,8024	0,06924	0,08272	0,83703	28,955	205,647	41,125
0,05736	0,06060	0,94662	36,493	0,06570	0,05608	1,06120	42,0408	0,06301	0,05509	1,14371	42,524	173,903	34,776
0,07173	0,11284	0,63569	21,521	0,07592	0,11245	0,67254	19,8337	0,06974	0,11160	0,62493	19,572	90,201	18,034

Lampiran 6. Perhitungan Nilai Locatiant Quotient (LQ) Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000

No.	Sub Sektor	1996			1997			1998		
		vi/vt (1)	Vi/Vt (2)	LQ (1 / 2)	vi/vt (3)	Vi/Vt (4)	LQ (3 / 4)	vi/vt (5)	Vi/Vt (6)	LQ (5 / 6)
1.	Pertanian	0,439	0,166	2,645	0,412	0,160	2,577	0,410	0,181	2,266
	1. Tanaman Bahan Makanan	0,295	0,107	2,760	0,270	0,099	2,721	0,266	0,119	2,242
	2. Tanaman Perkebunan	0,048	0,030	1,606	0,045	0,031	1,449	0,038	0,028	1,351
	3. Peternakan dan Hasilnya	0,073	0,015	4,814	0,072	0,016	4,638	0,059	0,016	3,638
	4. Kehutanan	0,009	0,004	2,067	0,009	0,004	2,179	0,012	0,004	2,778
	5. Perikanan	0,015	0,010	1,453	0,016	0,010	1,583	0,035	0,014	2,552
2.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,227	0,210	1,080	0,242	0,213	1,135	0,242	0,209	1,156
	a. Perdagangan	0,187	0,169	1,108	0,198	0,169	1,172	0,188	0,165	1,143
	b. Hotel	0,005	0,008	0,583	0,005	0,008	0,619	0,006	0,010	0,659
	c. Restoran	0,035	0,033	1,062	0,039	0,036	1,080	0,047	0,035	1,354
3.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,092	0,067	1,361	0,094	0,067	1,416	0,099	0,074	1,323
	a. Angkutan	0,089	0,056	1,593	0,091	0,053	1,735	0,095	0,058	1,650
	1. Angkutan rel	0,002	0,001	2,792	0,002	0,001	2,639	0,002	0,001	1,926
	2. Angkutan jalan raya	0,045	0,034	1,312	0,047	0,031	1,509	0,048	0,034	1,414
	3. Angkutan laut	0,019	0,003	5,803	0,018	0,003	5,225	0,020	0,004	5,365
	4. Angkutan penyeberangan	0,006	0,000	13,004	0,006	0,000	12,991	0,005	0,000	10,245
	5. Jasa penunjang angkutan	0,018	0,014	1,224	0,019	0,014	1,335	0,020	0,017	1,230
	b. Komunikasi	0,003	0,012	0,244	0,003	0,013	0,236	0,003	0,017	0,197
	1. Pos dan Telekomunikasi	0,002	0,011	0,209	0,002	0,012	0,204	0,003	0,016	0,171
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,001	0,001	0,986	0,001	0,001	0,852	0,001	0,001	0,592

Lanjutan (lampiran 6)

vi/vt (7)	1999			2000			Rata-rata LQ
	Vi/Mt (8)	LQ (7 / 8)	vi/vt (9)	Vi/Mt (10)	LQ (9 / 10)		
0,451	0,183	2,467	0,437	0,178	2,455	2,482	
0,296	0,122	2,426	0,292	0,119	2,467	2,035	
0,050	0,028	1,808	0,049	0,027	1,823	1,607	
0,067	0,016	4,116	0,061	0,016	3,737	4,189	
0,013	0,004	2,977	0,012	0,004	3,209	2,642	
0,024	0,013	1,852	0,023	0,013	1,799	1,848	
0,261	0,207	1,260	0,266	0,208	1,284	1,183	
0,211	0,163	1,298	0,216	0,162	1,328	1,210	
0,003	0,009	0,280	0,026	0,010	2,584	0,945	
0,047	0,035	1,338	0,048	0,035	1,376	1,242	
0,067	0,081	0,831	0,069	0,082	0,841	1,154	
0,063	0,058	1,094	0,065	0,057	1,129	1,440	
0,002	0,001	1,594	0,002	0,001	1,610	2,112	
0,018	0,033	0,549	0,018	0,031	0,569	1,070	
0,013	0,003	3,900	0,015	0,004	3,840	4,827	
0,007	0,000	15,898	0,007	0,001	13,409	13,109	
0,023	0,018	1,264	0,023	0,018	1,238	1,258	
0,004	0,023	0,168	0,004	0,025	0,179	0,205	
0,003	0,023	0,134	0,004	0,022	0,166	0,177	
0,001	0,002	0,322	0,001	0,003	0,276	0,605	

**Lampiran 7. Perhitungan Nilai Dynamic Location Quotient (DLQ) dan Analisis Skalling DLQ Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000**

No.	Sektor	gin	gn	Gi	G	DLQ	Skalling
1.	Pertanian	0,025	0,029	0,008	0,002	0,990	47,736
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,070	0,029	0,130	0,002	0,922	14,193
3.	Industri Pengolahan	0,001	0,029	0,003	0,002	0,972	38,853
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,018	0,029	0,109	0,002	0,894	0,000
5.	Konstruksi	-0,097	0,029	-0,061	0,002	0,937	21,268
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,065	0,029	0,001	0,002	1,035	70,170
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	-0,013	0,029	0,043	0,002	0,921	13,408
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	0,088	0,029	-0,033	0,002	1,096	100,000
9.	Jasa-jasa	0,045	0,029	0,007	0,002	1,010	57,714

Lampiran 8. Perhitungan Nilai Dynamic Location Quotient (DLQ) Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000

No.	Sektor	gin	gn	Gi	G	DLQ
1	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	0,087	0,029	-0,033	0,002	1,095
	a. Bank	-0,146	0,029	-0,179	0,002	1,012
	b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,141	0,029	-0,026	0,002	1,140
	c. Sewa Bangunan	0,086	0,029	0,034	0,002	1,023
	d. Jasa Perusahaan	0,313	0,029	0,034	0,002	1,236
2	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,065	0,029	0,001	0,002	1,036
	a. Perdagangan	0,060	0,029	-0,156	0,002	1,223
	b. Hotel	0,106	0,029	3,075	0,002	0,264
	c. Restoran	0,096	0,029	2,439	0,002	0,310
3	Jasa-jasa	0,045	0,029	0,007	0,002	1,010
	a. Pemerintahan Umum	0,036	0,029	-0,001	0,002	1,010
	b. Swasta	0,069	0,029	0,015	0,002	1,025
	1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,104	0,029	-0,011	0,002	1,087
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	0,015	0,029	0,040	0,002	0,951
	3. Jasa Perseorangan dan Rumah Tangga	0,052	0,029	0,022	0,002	1,002

## Lampiran 9. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Timur Tahun 1996 - 2000 (%)

No.	Sektor Ekonomi	1996	1997	1998	1999	2000	Rara-rata
1.	Pertanian	4,91916	1,04270	-5,02227	2,19460	0,69952	0,76674
2.	Pertambangan dan Pengalihan	0,09828	-10,88105	-42,68580	63,50820	54,76721	12,96137
3.	Industri Pengolahan	11,86988	9,66863	-22,18230	-0,05269	2,18838	0,29838
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	25,82371	0,28579	3,15722	12,99646	12,38024	10,92868
5.	Konstruksi	9,69841	3,08747	-33,22276	-9,91313	-0,35939	-6,14188
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,17298	6,42612	-17,78540	0,30162	3,46067	0,11520
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	9,06936	3,92688	-6,36089	9,64701	5,37078	4,33063
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	5,19068	4,17416	-20,48993	-6,33081	0,95566	-3,30005
9.	Jasa-jasa	3,31531	2,87302	-5,32181	0,86416	1,98648	0,74343
	Produk Domestik Regional Bruto	8,21181	5,05586	-16,12044	1,21340	2,76299	0,22472

## Lampiran 10. Analisis Skalling Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000 (%)

No.	Sektor	1996	Skalling	1997	Skalling	1998	Skalling	1999	Skalling	2000	Skalling	Total Skalling	Reskalling
1.	Pertanian	5,409	5,001	-0,166	0,000	1,243	72,989	3,345	74,459	2,490	64,696	217,145	32,300
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,020	8,614	17,138	100,000	-17,777	43,485	21,117	100,000	8,572	82,459	334,558	75,145
3.	Industri Pengolahan	5,807	7,352	14,094	82,411	0,050	71,138	-31,205	24,808	11,964	92,367	278,075	54,534
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	13,724	54,187	13,802	80,722	15,495	95,096	-48,467	0,000	14,578	100,000	330,005	73,484
5.	Konstruksi	6,181	8,566	7,600	44,879	-45,810	0,000	3,154	74,185	-19,662	0,000	128,630	0,000
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,977	20,190	13,462	78,756	1,469	73,340	1,527	71,846	7,840	80,322	324,455	71,458
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,564	0,000	9,645	56,696	6,088	80,504	-36,050	17,844	9,094	83,984	239,026	40,285
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	21,468	100,000	16,018	93,524	-2,444	67,269	7,658	80,658	1,299	61,219	402,670	100,000
9.	Jasa-jasa	4,635	0,420	2,813	17,216	18,656	100,000	-0,507	68,924	-2,981	48,719	235,278	38,917

**Lampiran 11. Analisis Skalling Pertumbuhan Sub Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000 (%)**

No.	Sub Sektor	Tahun				Rata-rata	
		1996	1997	1998	1999		2000
	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	21,468	16,018	-2,444	7,658	1,299	8,800
	a. Bank	42,132	21,970	-45,000	-48,691	-43,507	-14,619
	b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	15,324	12,810	29,843	16,686	-4,387	14,055
	c. Sewa Bangunan	13,782	12,830	0,110	12,570	3,769	8,612
	d. Jasa Perusahaan	67,494	34,080	25,316	17,734	11,685	31,262

Lampiran 12. Perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja Sektor Ekonomi  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000

No.	Sektor Ekonomi	1996			1997			1998			Skalling		
		L	Q	E	L	Q	E	L	Q	E	L	Q	E
1.	Pertanian	0,412	5,409	0,076	100,000	0,790	-0,166	-4,765	0,000	1,692	1,243	1,361	5,892
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,178	6,020	0,029	38,242	0,785	17,138	0,046	95,343	1,683	-17,777	-0,095	1,708
3.	Industri Pengolahan	0,206	5,807	0,035	46,067	0,790	14,094	0,056	95,546	1,693	0,050	34,112	100,000
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,468	13,724	0,034	44,345	0,776	13,802	0,056	95,550	1,695	15,495	0,109	2,295
5.	Konstruksi	0,018	6,181	0,003	2,949	0,791	7,600	0,104	96,497	1,689	-45,810	-0,037	1,875
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,005	7,977	0,001	0,000	0,800	13,462	0,059	95,612	1,691	1,469	1,151	5,288
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,049	4,564	0,011	13,402	0,763	9,645	0,079	96,003	1,715	6,088	0,282	2,790
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	0,131	21,468	0,006	7,224	0,828	16,018	0,052	95,459	1,685	-2,444	-0,689	0,000
9.	Jasa-jasa	0,014	4,635	0,003	3,043	0,790	2,813	0,281	100,000	1,692	18,656	0,091	2,241

Lanjutan (lampiran 12)

	1999			Skalling			2000			Skalling Total Skalling Reskalling		
	L	Q	E	L	Q	E	L	Q	E	L	Q	E
0,780	3,345	0,233	88,767	0,633	2,490	0,254	60,735	255,393	60,43667			
0,667	21,117	0,032	76,919	0,761	8,572	0,089	41,071	253,282	59,58682			
0,640	-31,205	-0,021	73,857	0,772	11,964	0,065	38,189	353,659	100			
0,682	-48,467	-0,014	74,236	0,752	14,578	0,052	36,656	253,081	59,50584			
0,650	3,154	0,206	87,182	0,763	-19,662	-0,039	25,912	214,415	43,93821			
0,648	1,527	0,424	100,000	0,765	7,840	0,098	42,118	243,019	55,45453			
0,649	-36,050	-0,018	74,005	0,766	9,094	0,084	40,535	226,735	48,89826			
0,637	7,658	0,083	79,952	0,760	1,299	0,585	100,000	282,635	71,40478			
0,648	-0,507	-1,277	0,000	0,766	-2,981	-0,257	0,000	105,284	0			

## Lampiran 13. Analisis Sektor Prioritas Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000

No.	Sektor Ekonomi	Total		DLQ	Total		Reskalling	Prioritas
		LQ	P		E	Skalling		
1.	Pertanian	500,000	217,145	47,736	255,393	1.020,275	100,000	1
2.	Pertambangan dan Penggalian	57,989	334,558	14,193	253,282	660,022	45,077	7
3.	Industri Pengolahan	9,985	278,075	38,853	353,659	680,571	48,210	6
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	98,877	330,005	0,000	253,081	681,963	48,422	5
5.	Konstruksi	0,036	128,630	21,268	214,415	364,349	0,000	9
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	212,180	324,455	70,170	243,019	849,824	74,014	3
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	205,647	239,028	13,408	226,735	684,818	48,858	4
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	173,903	402,670	100,000	282,635	959,209	90,690	2
9.	Jasa-jasa	90,201	235,278	57,714	105,284	488,477	18,924	8

**Lampiran 14. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996 - 2000 (jiwa)**

No.	Sektor/ Sub Sektor	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1.	Pertanian	263.598	264.683	266.773	271.287	273.403	275.134
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.942	3.949	3.980	4.047	4.074	4.105
3.	Industri Pengolahan	49.133	49.234	49.623	50.463	50.786	51.178
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.262	1.288	1.298	1.320	1.329	1.339
5.	Konstruksi	28.197	28.202	28.425	28.905	29.093	29.315
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	97.418	97.423	98.202	99.863	100.510	101.279
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	18.335	18.344	18.484	18.801	18.923	19.068
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	2.293	2.296	2.315	2.354	2.369	2.387
9.	Jasa-jasa	80.752	80.763	81.401	82.778	83.314	83.952



UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER